43254.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA TANJUNGPINANG

TAPM Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

ASRIAN ADERI,S.IP

NIM. 500627965

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2018

EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA TANJUNGPINANG

ASRIAN ADERI S.IP
(asrianaderi.sip@gmail.com)
Program Pascasarjana Universitas Terbuka

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang. dengan mengetahui sejauh mana system pengelolaan persampahan yang berjalan selama ini di Kota Tanjungpinang serta sebaik apa system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini dijalankan sehari-harinya. Dengan mengetahui perkembangan sejauh mana system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang, diharapakan mampu menerapkan suatu inovasi-inovasi agar system pengelolaan persampahan dapat berjalan semaksimal mungkin serta instansi – instansi terkait dapat menerapkan inovasi – inovasi baru terhadap system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan memahami serta mengevaluasi sesuatu system pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang yang berjalan selama ini melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang memerlukan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan konseptual, bukan hanya melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Sistem pengelolaan persampahan yang ada selama ini belum dijalankan secara optimal. Beberapa langkah yang bisa dilakukan diantaranya Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu terus melakukan penanaman nilai - nilai serta menciptakan kebijakan – kebijakan dalam sistem pengelolaan persampahan yang nantinya diharapkan dapat mengatasi masalah persampahan di Kota Tanjungpinang dengan maksimal, Perlunya inovasi dalam sistem pengelolaan persampahan oleh pemerintah sebagai *stakeholder* guna menciptakan Kota Tanjungpinang yang bersih baik inovasi dalam system, teknologi serta manajemen, serta Pemerintah dapat melihat mencontoh bahkan memodifikasi sistem pengelolaan persampahan negara – negara maupun daerah – daerah yang telah berhasil mengatasi permasalahan sampahnya yang salah satu caranya adalah melalui *benchmarking*.

Kata Kunci *: Sistem Pengelolaan Persampahan, Inovasi sistem pengelolaan persampahan*

43254.pdf

EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA TANJUNGPINANG

ASRIAN ADERI S.IP
(asrianaderi.sip@gmail.com)
Program Pascasarjana Universitas Terbuka

ABSTRACT

This study was conducted to evaluate the solid waste management system in the city of Tanjungpinang. to determine the extent of the waste management system that runs throughout in Tanjungpinang as well as how well the waste management system in the city of Tanjungpinang is run day-to-day. By knowing the development of the extent to which the system of waste management in the city of Tanjungpinang, expected to be able to apply an innovation that the system of waste management can run as much as possible and agencies - agencies can implement innovation - new innovations to the system of waste management in the city of Tanjungpinang.

The study was conducted using a qualitative approach. Data analysis in qualitative research carried out at the time of data collection takes place, and after the completion of data collection in a particular period. Chosen qualitative approach in this research aims to uncover and understand and evaluate something the system of waste management in the city of Tanjungpinang running for this through the Department of Housing, Region Settlements, Sanitation and Tanjungpinang requires a number of field data that is actual and conceptual, not only through Statistical procedures or forms of matter.

The analysis shows that existing waste management system has not run optimally. Several steps can be carried out include the City of Tanjungpinang need to continue the planting of value - value and create policies - policies in the system of waste management which is expected to solve the problem of solid waste in the city of Tanjungpinang to the maximum, Need for innovation in the system of waste management by the government as a *stakeholder* in order to create Tanjungpinang clean nice innovation in systems, technology and management, as well as the Government may look to imitate even modify the state waste management system - state and local - area that has managed to overcome the problems of trash that one way is through benchmarking.

Keywords: *System Waste Management, Innovation system of managemen waste*

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul " **Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan Di Kota Tanjungpinang** " adalah hasil karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tanjungpinang,

Yang Menyatakan

ASRIAN ADERI S.IP

NIM. 500627965

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : ASRIAN ADERI S.IP
NIM : 500627965
Program Studi : Administrasi Publik
Judul TAPM : **Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan Di Kota Tanjungpinang**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu / 20 Januari 2018
Waktu : 11.00 wib s.d 12.30 wib

Dan telah dinyatakan **LULUS.**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji	Tandatangan
Nama : drh. Ismed Sawir, M.Sc	.....
Penguji Ahli	
Nama : Prof. Dr. Aries Djaenuri, MA	.....
Pembimbing I	
Nama : Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA	.....
Pembimbing II	
Nama : Dr. Heri Wahyudi. S.Sos. M.Si	.....

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

Judul TAPM : **Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan Di Kota Tanjungpinang**

Penyusun TAPM : ASRIAN ADERI S.IP
NIM : 500627965
Program Studi : Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Sabtu / 20 Januari 2018

Menyetujui:

Pembimbing II

Dr. Heri Wahyudi. S.Sos. M.Si
NIP. 19710511 200604 1 002

Pembimbing I

Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA
NIP. 19720710 198803 2 001

Penguji Ahli

Prof. Dr. Aries Djaenuri, MA.
NIP. 19470401 196805 1 001

Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Progam Pascasarjana Universitas Terbuka

Dr. Darmanto, M.Ed.
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Dr. Liestyodono B.Irianto, M.Si
NIP. 19581215 198601 1 009

RIWAYAT HIDUP

Nama : ASRIAN ADERI S.IP

NIM : 500627965

Program Studi : Administrasi Publik

Judul TAPM : EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA TANJUNGPINANG

Riwayat Pendidikan :

- Lulus SD di SD Negeri 012 Tanjungpinang Barat pada tahun 1992
- Lulus SMP di SMP Negeri 8 Tanjungpinang Barat pada tahun 1995
- Lulus SMA di SMK Negeri 3 Tanjungpinang pada tahun 1998
- Lulus S1 di STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang pada tahun 2012

Riwayat Pekerjaan :

Tahun 2002 s/d 2006 sebagai Honorer 2006 s/d Sekarang sebagai pegawai staf di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang.

..... , ...

Asrian Aderi. S.IP

NIM. 500627965

Kata Pengantar

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdullillah, penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, yang telah memberikan segala kekuatan, kemampuan, dan kelancaran kepada penulis untuk melakukan penelitian dan dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul "Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan Di Kota Tanjungpinang". Maksud dan tujuan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh program magister. Selama pelaksanaan penelitian ini penulis mendapat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Liestyodono Bawono, M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
2. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed selaku Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
3. Bapak drh. Ismed Sawir, M.Sc selaku Kepala UPBJJ Universitas Terbuka Batam.
4. Ibu Dr. Nurliah Nurdin, M.A selaku pembimbing I yang telah banyak membantu dengan kritik dan sarannya dalam penyelesaian Tugas Akhir

Program Magister (TAPM) ini sekaligus memberikan motivasi yang cukup besar kepada penulis.

5. Bapak Dr. Heri Wahyudi. S.Sos.. M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dengan kritik dan sarannya dalam penyelesaian ugas Akhir Program Magister (TAPM) ini sekaligus memberikan motivasi yang cukup besar kepada penulis.
6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu yang dimiliki dari hal yang tidak diketahui menjadi tahu selama beliau-beliau memberikan ilmunya dalam proses belajar-mengajar di kampus Universitas Terbuka Batam.
7. Staf administrasi di kampus Universitas Terbuka Batam yang selama ini telah membantu penulis dalam hal surat-menyurat untuk keperluan penulis selama ini.
8. Kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang dan seluruh staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan yang telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi berkaitan dengan penelitian.
9. Rasa terima kasih yang tidak terhingga penulis berikan kepada Keluarga, Ayah, ibu, istri dan anak tercinta, yang telah membesarkan dan memberikan bimbingan dan do'a yang tiada henti untuk penulis, serta kepada kakak dan adik kandung, Abang dan adik ipar dan keponakan-keponakan kecil yang telah banyak memberi motivasi dan dukungannya.
10. Kemudian untuk seluruh teman-teman seperjuangan Program Pascasarjana Jurusan Ilmu Administrasi Publik pada Universitas Terbuka Batam Angkatan

2015.2 yang selalu memberi dukungan terbesar dalam menyelesaikan pembuatan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dan secara keseluruhan semuanya telah memberikan motivasi dan semangat yang berlipat ganda kepada penulis.

Akhir kata dengan segala keterbatasan dan kemampuan serta pengetahuan, penulis menyadari masih banyak yang perlu diperbaiki. Untuk itulah kritik maupun saran dari seluruh pihak sangat membantu dalam penyempurnaannya. Demikian, semoga Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi pengembang proses belajar-mengajar di kampus Universitas Terbuka Batam yang kita cintai ini. Amin.

Wassalaamua'alikum Wr.Wb

Batam, 2017

Penulis

Asrian Aderi, S.IP

43254.pdf

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK i
LEMBAR PENGESAHAN iv
LEMBAR PERSETUJUAN v
RIWAYAT HIDUP vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR BAGAN xi
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Perumusan Masalah 15
- C. Tujuan Penelitian 15
- D. Kegunaan Penelitian 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
- A. Kajian Teori 17
- B. Penelitian Terdahulu 36
- C. Kerangka Berpikir 46

BAB III METODE PENELITIAN
- A. Desain Penelitian 51
- B. Populasi dan Sampel 52
- C. Instrumen Penelitian 56
- D. Prosedur Pengumpulan Data 56
- E. Jenis dan Sumber Data 58
- F. Metode Analisis Data 58

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
- A. Deskripsi Objek Penelitian 59
- B. Hasil 64
- C. Pembahasan 89

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
- A. Kesimpulan 101
- B. Saran 103

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR BAGAN
DAFTAR TABEL
DAFTAR LAMPIRAN

43254.pdf

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan Desain Penelitian..... 50

43254.pdf

DAFTAR TABEL

Halaman

Tipe Evaluasi Kebijakan 30
Indikator Evaluasi Kebijakan 32
Kriteria Evaluasi Kebijakan 33
Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang akan di lakukan 40
Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin..... 53
Karakteristik Informan Berdasarkan Umur..... 53
Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 54
Karakteristik Informan Berdasarkan Masa Kerja..... 55
Jumlah Pegawai/Honorer berdasarkan status Kepegawaian di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang Tahun 2017 61
Jumlah Pegawai/Honorer menurut Jenis Kelamin di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang Tahun 2017 62
Jumlah Pegawai/Honorer Menurut Tingkat Pendidikan Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2017 63
Jumlah Pegawai/Honorer Menurut Umur Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2017 63
Jumlah Pegawai/Honorer Menurut Masa Kerja Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2017 64
Jumlah Pegawai/Honorer Menurut Golongan Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2017 65

43254.pdf

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Wawancara
2. Pedoman Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota sekaligus merupakan Ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Dengan Koordinat 0°5' Lintang Utara; 104°27' Bujur Timur, kota ini memiliki pesona menarik dengan beragam kultur budaya suku dari hampir seluruh Indonesia masuk ke kota ini, dengan bahasa Melayu yang masih tergolong klasik, dan sedikit unik terdengar di telinga orang-orang dari luar kota namun memiliki daya tarik tersendiri.

Masalah sampah sebagai salah satu bagian dari permasalahan yang terkait dengan bidang lingkungan hidup. Bagi daerah-daerah perkotaan terutama bagi daerah-daerah yang berkembang sebagai pusat kegiatan industry ataupun sebagai wilayah pemukiman, menjadi salah satu agenda permasalahan pemerintah setempat dan hal tersebut harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Banyak keluhan masyarakat Tanjungpinang tentang penanganan sampah di daerahnya yang dianggap masih belum maksimal, dan ternyata menjadi perhatian penting oleh pemerintah Kota Tanjungpinang. Untuk mewujudkan Kota bersih, rapi, indah, nyaman, dan sehat bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dalam pelaksanaannya.

Penyelesaian permasalahan sampah haruslah menjadi titik berat bagi suatu negara, langkah – langkah penyelesaian dalam pengelolaan sampah harus segera dilakukan, hal ini mengingat terus meningkatnya volume sampah di setiap negara dari hari ke harinya. Sampah jika tidak dapat dikelola dengan baik alih – alih menjadi manfaat malah akan menimbulkan permasalahan – permasalahan baru

dimasyarakat, seperti ancaman dalam masalahan kesehatan, pencemaran lingkungan dan lain – lain. Dari sumber – sumber yang diperoleh seperti dari berita program lingkungan hidup (UNEP) yang mengutip data Bank Dunia bahwa volume sampah telah mencapai 1,3 miliar ton per tahun, dan volume ini diperkirakan akan terus naik diperkirakan dapat mencapai 2,2 miliar ton pada tahun 2025 (http://www.hijauku.com/2012/11/10/dunia-hadapi-krisis-sampah/).

Permasalahan dalam pengelolaan sampah bukan hanya terjadi di Indonesia, di negara – negara lain sampah juga menjadi suatu permasalahan yang belum dapat terselesaikan dengan baik, bahkan tidak jarang berakhir menjadi bencana yang menimbulkan korban jiwa. Di Beirut,Libanon, pada tahun 2015 pemerintah Beirut menutup TPA terbesar di kota tersebut yang mengakibatkan jalan – jalan di Beirut dipenuhi oleh sampah. Lain hal lagi dengan Filipina, dimana di Kota Metro Manila, TPA Patayas roboh dan mengakibatkan sekitar 300 korban jiwa. Pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi, berpengaruh juga terhadap tingkat konsumsi masyarakat yang pada akhirnya menghasilkan sampah.

Tingginya tingkat produksi sampah tidak hanya terjadi pada negera – negara berpendapatan rendah, negara – negara yang seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Jerman yang tergolong negara maju tingkat produksi sampahnya terus meningkat, bahkan negara – negara tersebut masuk dalam 10 negara penghasil sampah terbanyak di dunia.

Amerika sendiri saja menghasilkan sampah kurang lebih 236 ton/tahun, sedangkan Rusia memproduksi sampah pertahunnya diangka 200 juta ton, lain pula halnya dengan Jepang, meskipun Jepang sudah terkenal dengan tingkat daur

ulang yang tinggi, rata – rata tiap tahunnya memproduksi sampah sekitar 52 juta ton.

Penanganan permasalahan sampah menjadi keharusan untuk terus dicari berbagai metode guna penanggulangannya. Sistem pengelolaan sampah yang tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan, dapat mengancam kelangsungan hidup umat manusia, permasalahan – permasalahan baru yang ditimbulkan oleh sampah seperti masalah kesehatan, masalah lingkungan harus menjadi titik berat pemerintah untuk diselesaikan.

Negara – negara yang berkembang seperti India, Indonesia, Filipina dan lain – lain yang pada umumnya memandang sampah sebagai barang yang sudah tidak digunakan lagi, sehingga volume sampah tidak lagi diolah dan akan terus meningkat, di India Berbagai upaya dilakukan guna menanggulangi permasalahan sampah terutama dalam mengurangi dan menekan jumlah volume sampah, salah satunya adalah dengan melakukan incenerasi atau pembakaran.

Berbagai cara yang dilakukan oleh negara luar untuk terus berinovasi dalam menemukan solusi mengatasi permasalahan sampah, seperti di Brazil tepatnya di Kota Curitaba yang tak lepas dari permasalahan – permasalahan urban yang membuat populasi penduduk di kota tersebut meningkat pesat yang disertai dengan peningkatan volume sampah, namun dengan keterbatasan ketersediaan dana untuk pembangunan suatu pabrik daur ulang, pemerintah Kota Curitaba mencari alternatif lain dalam mengelola sampah yang lebih ekonomis dengan menggerakkan seluruh masyarakatnya untuk berperan aktif dalam mengurangi dan mengelola sampah, dimana upaya tersebut dikukuhkan kedalam program – program yang telah dirancang pemerintah seperti *"Gerbage that is not*

Gerbage" yang terdiri dari *The Gerbage Purchase* (Pembelian Sampah), *The Great Exchange* (Penukaran Sampah), *Free Open University For Environtment* (Pendidikan Lingkungan Hidup), dan *All Clean* (Semua Bersih).

Inovasi dalam pengelolaan persampahan di Kota Curitaba – Brazil tadi mampu membuat kota tersebut terlepas dari permasalahan sampah bahkan sebutan sebagai kota kumuh juga sudah terlepas dari kota Curitaba. Negara maju seperti Swedia juga mengambil berat dalam pengelolaan persampahan, berdasarkan data yang didapat dari www.nationalgeographic.co.id, Swedia yang merupakan negara maju ke-56 di dunia, terkenal dengan manajemen sampah yang baik, dan mayoritas sampah di negara tersebut bisa didaur ulang, bahkan saat ini Swedia kekurangan sampah untuk diolah menjadi bahan bakar pembangkit energi sehinggakan harus mengimport sampah dari negara – negara tetangga, hal itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan akan sampah yang diolah melalui sistem dan program *Waste to Energy* yang menghasilkan energi panas dan listrik untuk kebutuhan negaranya.

Pada dasaranya, sampah disamping dapat menimbulkan permasalahan – permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas tadi juga merupakan sumber energi atau yang dikenal dengan sebutan *waste to energy* sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara antara lainnya seperti Singapura, Swedia, Austria, Jerman dan masih banyak lagi yang telah berhasil mengubah sampah yang dihasilkan untuk menjadi sumber energi baru bagi negaranya.

Di Indonesia sendiri penanganan sampah merupakan permasalahan yang sampai saat ini dipandang belum terselesaikan dengan baik. Indonesia juga mengalami pertumbuhan dan peningkatan jumlah penduduk yang terus bertambah

setiap tahunnya, dimana berdasarkan data dari Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, penduduk Indonesia menghasilkan sampah sekitar 2,5 liter sampah per hari atau 625 juta liter dari jumlah total penduduk. Setiap harinya, sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia meningkat 175.000/ton atau setara 64 juta ton / tahun (http://kalteng.prokal.co/read/news/20429-masyarakat-indonesia produksisampah-64-juta-ton-per-tahun). Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat, dimana pada tahun 2019 saja produksi sampah di Indonesia diperkirakan mencapai angka 67,1 ton/tahun.

Produksi sampah di kota – kota besar di Indonesia meningkat dari hari ke hari. Kita ambil contoh untuk Jakarta saja sampah yang dihasilkan tiap harinya berkisar antara 6.000 sampai 6.500 ton, sedangkan Pulau Bali memproduksi sampah perharinya mencapai 10.725 ton, dan Palembang yang produksi sampahnya meningkat dari 700 ton per hari menjadi 1.200 ton per hari. (http://geotimes.co.id).

Sebagaimana negara – negara yang mengelami bencana yang diakibatkan dari buruknya penanganan permasalahan sampah, hal serupa juga pernah terjadi di Indonesia, seperti yang terjadi pada tahun 2005 yang selanjutnya diperingati sebagai Hari Peduli Sampah, yaitu pada TPA Leuwigajah yang disebut bencana TPA terbesar yang mengakibatkan 163 korban jiwa dan 137 unit rumah tertimbun. (www.kompasiana.com), di TPA Bantargebang – Bekasi, di TPA Galuga – Bogor, di TPA Sumur Batu - Bekasi, yang dalam kejadiannya memakan korban jiwa sekaligus menggambarkan belum baiknya pengelolaan sampah di Indonesia, belum lagi permasalahan lain seperti banjir yang terjadi hampir disetiap tahunnya, sampai pada masalah kesehatan yang semuanya sebagian besar

ditimbulkan oleh sampah. Indonesia juga mendapat peringkat ke 2 sebagai negara penyumbang sampah ke laut terbesar di dunia, yaitu mencapai angka 187,2 juta ton per tahun, dimana 57% nya adalah sampah plastik.

Indonesia pada umumnya menyadari akan hal itu, menyadari bahwa permasalahan sampah harus diselesaikan sesegera mungkin, meskipun terdapat beberapa daerah yang telah berhasil menekan meningkatnya volume sampah dengan sistem yang dibangun oleh masing – masing daerah seperti Surabaya yang gencar mengelola sampah yang dimulai dari pemilahan atau pemisahan sampah ditingkat sumber, menggiatkan program daur ulang sehingga sampah yang diangkut ke TPA benar – benar sampah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi.

Palembang – Sumatera Selatan juga telah membuat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang memanfaatkan sampah sebagai sumber energinya, Kota Semarang – Jawa Tengah telah membuat berbagai terobosan dalam menyikapi permasalahan sampah di kotanya, diantaranya dengan mengolah sampah menjadi pupuk organik, memproduksi gas methan yang telah dapat dikonsumsi oleh masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan, pembangunan *Landfill Gas System* yang bekerjasama dengan negara Denmark, membentuk dan memberdayakan kelompok masyarakat peduli lingkungan (www.semarangkota.go.id).

Upaya – upaya serta inovasi – inovasi yang dilakukan oleh daerah – daerah di Indonesia yang telah disebutkan tadi adalah sebagian kecil wilayah Indonesia yang mengambil berat permasalahan sampah, dan masih terdapat banyak wilayah atau daerah di Indonesia yang belum mampu mengatasi permasalahan – permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah. Pemerintah

Indonesia khususnya pemerintah daerah haruslah menemukan formulasi yang tepat guna mengantisipasi meningkatkanya produksi sampah, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2016 telah mencanangkan Indonesia Bebas Sampah 2020, melalui siaran persnya Kementerian Lingkungan Hidup mencanangkan uji coba penghematan kantong plastik, mendeklerasikan Indonesia Bebas Sampah 2020, gerakan gotong royong serentak di seluruh Indonesia.

Data – data yang tersaji, peristiwa – peristiwa yang terjadi di negara – negara di dunia termasuk daerah – daerah di Indonesia, juga terjadi di Tanjungpinang. Peningkatan volume sampah juga terjadi di Kota Tanjungpinang, dimana dapat kita lihat pada kurun waktu 3 tahun terakhir meningkat antara 1000 – 2000 ton per tahun *(sumber data Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang)*. Faktor – faktor yang mengakibatkan meningkatnya volume sampah di Kota Tanjungpinang juga tidak berbeda dengan daerah – daerah lain baik negara luar maupun daerah – daerah di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk, tingkat konsumsi masyarakat, perkembangan teknologi, letak geografis dan lain – lain.

Sebagai gambaran Kota Tanjungpinang sendiri dengan latar belakang sebagai daerah kepulauan yang mempunyai luas kurang lebih 812.7 KM, dengan jumlah penduduk 287.973 jiwa, dan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang sebagai Ibu Kota dari Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan fungsinya membentuk organisasi yang merupakan perangkat daerah yaitu Dinas Perumahan Rayat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan yang mempunyai tugas salah satunya melaksanakan pengelolaan persampahan.

Dengan sumber dana yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai upaya dalam menjalankan program – program pengelolaan persampahan sebesar kurang lebih 6 Milyar pada tahun 2016, dan sebesar kurang lebih 8 Milyar pada tahun 2017, sehingga dari sedikit gambaran tadi kita dapat melihat keseriusan dan titik berat Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam mengatasi permasalahan sampah.

Program – program yang disusun guna mengatasi persoalan persampahan di Kota Tanjungpinang antara lain adalah dengan terus meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, pembiayaan operasional dan lain – lain, namun permasalahan sampah belum juga dapat terselesaikan dengan baik, malah yang terlihat saat ini adalah masih banyaknya tumpukan – tumpukan sampah yang terdapat di sudut – sudut Kota Tanjungpinang, banjir yang masih terjadi di beberapa ruas jalan disaat turun hujan, sampah yang menumpuk di laut di kawasan – kawasan pelantar, bahkan hingga keluhan – keluhan masyarakat terhadap lambatnya penanangan pengangkutan sampah juga masih sering terjadi.

Pada tahun 2016 perkiraan volume timbulan sampah di Kota Tanjungpinang adalah sebanyak 61.236 ton dan volume sampah yang terangkut ke TPA adalah sebesar 24.890 ton, ini berarti hanya 40,58% saja sampah yang terangkut ke TPA, tanpa tersedianya data yang menggambarkan persentase jumlah data yang diolah sebelum dilakukan pengakutan ke TPA.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kota Tanjunginang sendiri memiliki luas kurang lebih 12 Ha yang diberi nama TPA Ganet, yang dapat diperkirakan pada tahun – tahun ke depan TPA Ganet mungkin tidak lagi mampu menampung sampah yang masuk jika sistem pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang tidak

segera diubah atau pemerintah tidak segera menemukan inovasi – inovasi baru dalam pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang masih menggunakan metode yang bisa disebut konvensional yaitu pengelolaan sampah dengan metode kumpul, angkut dan buang, sehingga fokus pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang adalah pada pengelolaan TPA, meskipun pengelolaan sampah di TPA tidak lagi menggunakan sistem *Open Dumping*, namum sudah beralih ke *control landfill* dan *sanitary landfill*, tetap saja keterbatasan lahan adalah masalah utama dalam pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang jika menggunakan sistem atau metode yang sudah ada saat ini.

Penanganan sampah secara konvensional dirasakan tidak lagi dapat menekan bahkan mengatasi peningkatan volume produksi sampah, pemerintah sebagai *stakeholder* perlu mencari formulasi dan solusi yang tepat dalam mengelola masalah persampahan. Saat ini meskipun sering kita mendengar istilah atau anggapan bahwa budaya masyarakat dalam membuang sampah di sembarang tempat juga sangat berpengaruh, namun disinilah peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan – kebijakan yang nantinya diharapkan mampu mengatasi permasalahan sampah khususnya permasalahan sampah di Kota Tanjungpinang sangat diperlukan.

Pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang bukanlah semata – mata menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai *stakeholder*, tapi juga diperlukan peran serta aktif dari penghasil – penghasil sampah (sumber sampah) yaitu masyarakat, pelaku usaha, lembaga – lembaga swadaya masyarakat dll. Peran serta aktif dari setiap elemen yang disebutkan tadi sangat diperlukan guna

mensukseskan program – program serta upaya – upaya yang disusun oleh pemerintah dalam pengelolaan sampah. Saat ini program – program pemerintah dalam menanggulangi permasalahan sampah atara lain adalah dengan melakukan program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Pemerintah juga dengan tegas dan keseriusannya meciptakan berbagai peraturan perundang – undangan dalam pengelolaan sampah melalui Kementerian Lingkungan Hidup yang diikuti dengan Peraturan – Peraturan Daerah, tidak terkecuali Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan Peraturan Daerah Nomor: 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan, serta kebijakan – kebijakan dalam pengelolaan sampah.

Upaya – upaya yang dilakukan sudah cukup banyak, namun diperlukan suatu inovasi – inovasi baru dalam pengelolaan serta pemanfaatan sampah, yang salah satunya adalah mungkin dengan strategi *bencmark*, yaitu mencontoh dari negara – negara atau daerah – daerah di Indonesia yang telah berhasil mengelola dan memanfaatkan sampah dengan baik.

Sebagai kota yang sedang berkembang, Kota Tanjungpinang merupakan magnet tersendiri bagi mahasiswa – mahasiswa, kelompok – kelompok masyarakat penggiat dan pemerhati lingkungan guna menghasilkan kajian – kajian mengenai pengelolaan persampahan. Hasil – hasil kajian tersebut sebenarnya dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan – kebijakan dalam pengelolaan persampahan bahkan sampai kepada penetapan sistem pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang.

Titik berat pada setiap kajian berbeda – beda, namun sampai pada saat ini dapat disimpulkan beberapa hal dimana salah satunya adalah evaluasi terhadap sistem pengelolaan persampahan itu sendiri, paradigma – paradigma lama dalam mengelola sampah yang dirasakan sudah tidak tepat lagi perlu dilakukan pembaharuan serta rumusan baru dalam pengelolaan persampahan.

Sebagai langkah awal pemerintah dapat memulainya melalui pembuatan suatu peraturan – peraturan atau kebijakan - kebijakan yang berkaitan dengan sistem pengelolaan persampahan. Di Kota Tanjungpinang sendiri saat ini memiliki peraturan perundang – undangan yang mengatur tetang pengelolaan persampahan, baik itu Peraturan Daerah maupun kebijakan – kebijakan dan pada akhirnya diimplementasikan menjadi suatu sistem pengelolaan persampahan yang didalamnya memuat suatu target dan sasaran guna menciptakan Kota Tanjungpinang yang bersih dan sehat.

Dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan melalui sistem yang dibangun sebelumnya dirasakan masih terdapat kekurangan – kekurangan serta masih banyak peluang – peluang yang ada yang dapat meningkatkan lagi pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang menjadi lebih baik lagi. Untuk memenuhi harapan tersebut, dapat dimulai dengan menyusun langkah – langkah ke arah perbaikan sistem yang dapat dimulai dengan melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang yang sudah berjalan.

Kajian – kajian dan bahkan penelitian – penelitian yang dilakukan dapat menjadi informasi bagi pemerintah daerah yang digunakan sebagai masukan dalam mengambil kebijakan – kebijakan pengelolaann persampahan yang lebih tepat. Kajian – kajian yang telah dilakukan antara lain meliputi implementasi

peraturan perundang – undangannya, motivasinya, bahkan yang lebih mengedepankan lingkup ekonomisnya. Penelitian yang dilakukan dengan mengevaluasi sistem pengelolaan persampahan ini juga dilakukan melalui tahapan – tahapan yang pada akhirnya dapat diketahui bahwa sebelum mengevaluasi kita harus mengetahui bagaimana implementasi dari pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang yang dapat dilihat pada jurnal terdahulu mengenai Implementasi Pengelolaan Persampahan di Kota Tanjungpinang.

Implementasi kebijakan itu sendiri memerlukan empat faktor yang krusial terdiri atas: Komunikasi, Sumber-sumber, Kecenderungan-kecenderungan, Struktur birokrasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pemikiran orang lain atau kelompok kepada individu lain agar orang lain atau kelompok lain paham dengan apa yang disampaikan dan diinformasikan sehingga didapati hasilnya bahwa faktor komunikasi dengan adanya sosialisasi sangat berpengaruh terhadap berhasilnya pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan,

b. Sumber – Sumber

Indikator sumber-sumber dengan dimensi sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah berpengaruh terhadap berhasilnya pelaksanaan pengelolaan persampahan yang telah ditetapkan. Di Kota Tanjungpinang, sarana dan prasarana yang diberikan kepada masyarakat sebagai upaya dalam menumbuhkan peran serta masyarakat masih sangat minim.

c. Kecendrungan – Kecendrungan

Kecenderungan – kecenderungan disini meliputi sikap masyarakat dan aparatur pemerintah mengenai kebijakan itu sendiri. Sikap masyarakat maupun pemerintah dalam upaya mengatasi masalah persampahan di Kota Tanjungpinang tergolong baik, antusias masyarakat dalam menjalankan program – program pemerintah sangat tinggi juga menjadi modal bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dalam pengelolaan persampahan. Kepatuhan masyarakat atas peraturan yang dibuat oleh pemerintah sebagian besarnya sudah baik, meskipun masih terdapat kecenderungan untuk tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang didalamnya meliputi antara lain Prosedur kerja dasar atau yang lebih kita kenal dengan singkatan SOP *(Standart Operating Procedure)* yang dalam bahasa Indonesianya diartikan sebagai Prosedur Standar Pengoperasian. Organisasi Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP tadi telah menjalankannya dengan baik, dari mulai waktu kerja, waktu pengangkatan, prosedur pengangkutan, hingga pengawasan pelaksanaan SOP dimaksud.

Dengan demikian melalui data – data, sumber – sumber sebelumnya di atas, dapat diambil kesimpulan mengenai penerapan sistem pengelolaan persampahan belum maksimal sepenuhnya dilakukan selama ini yang dikarenakan masih ditemukan beberapa faktor penghambat yang sangat mempengaruhi pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanujungpinang.

Berdasarkan keadaan yang telah dilihat melalui penelitian sebelumnya bahwa penerapan yang dikaitan dengan penelitian kali ini mengenai evaluasi, sehingga dapat ditemukan permasalahan - permasalahan, dimana dalam penelitian ini adalah masalah pelaksanaan pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang.

Kota Tanjungpinang adalah salah satu tempat yang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau sebagai pusat pemerintahan yang berbanding lurus dengan meningkatnya aktivitas – aktivitas yang dapat menghasilkan sampah, seperti di pasar, pusat - pusat perbelanjaan, pusat – pusat kuliner, tempat – tempat rekreasi, perkantoran, perhotelan dan lain - lain yang sangat rawan dengan sampah dan banyak menghasilkan sampah, dan bila dilihat di lapangan banyak sekali terdapat pembuangan sampah yang tidak teratur pada tempatnya, bahkan berserakan di sepanjang area - area tersebut.

Masalah – masalah persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang dipandang belum maksimal dalam menciptakan lingkungan yang bersih yang menjadi tujuan dan sasaran dibentuknya suatu unit pemerintahan yang mengatur dan mengelola persampahan. Sehingga dapat diketahui bahwa sistem pengelolaan persampahan yang sudah ada perlu dievaluasi untuk mendapatkan sebuah sistem yang lebih efektif, efesien dan bernilai ekonomis dengan menghasilkan sebuah sistem yang nantinya sampah itu tidak hanya menjadi tumpukan tetapi sampah yang dihasilkan dapat diolah menjadi suatu hal yang produktif dan ekonomis.

Latar belakang di atas yang sekaligus menggambarkan berbagai permasalahan – permasalahan persampahan yang dihadapai di negara – negara luar baik itu negara yang telah maju maupun negara yang sedang berkembang

termasuk Indonesia dan daerah – daerahnya khususnya di Kota Tanjungpinang menjadikan hal tersebut sebagai objek dalam penelitian yang dilakukan ini, yaitu permasalahan sistem pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang dengan judul **"Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan Di Kota Tanjungpinang"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang?
2. Mengapa Sistem Pengelolaan Persampahan di Kota Tanjungpinang belum mampu mengatasi permasalahan sampah yang ada?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan Rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis sistem pengelolaan sampah yang ada di Kota Tanjungpinang
2. Menganalisis permasalahan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang

D. **Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian dengan tema *EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA TANJUNGPINANG* ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kahazah dan wawasan serta sajian data yang telah dianalisis tentang kunci tentang sistem pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang

2. Secara Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai hasil evaluasi hasil serta masukan kepada pengambil kebijakan dalam menyusun program – program penyelenggaraan system pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang yang lebih baik.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Dalam penelitian yang membahas tentang Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan Di Kota Tanjungpinang ini, peneliti mengambil beberapa teori yang terkait didalam penelitian kali ini sehingga dapat dilihat sebagai berikut :

1. Evaluasi

Evaluasi menjadi salah satu perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia, namun evaluasi adalah merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation.* Evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai menentukan nilai (dalam Miftahudin 2009 Suharso, 2005: 136). Istilah Evaluasi dalam Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Edisi Kedua) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment). Suatu evaluasi mempunyai karakteristik tertentu yang membedakan dari analisis, yaitu: fokus nilai, interdependensi fakta nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, dualitas nilai. Suharsimi Arikunto dalam Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan mengemukakan evaluasi program sebagai "suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program" selanjutnya dalam perspektif evaluasi hasil belajar, menyatakan bahwa fungsi penilaian meliputi: selektif, diagnostik, penempatan, pengukuran keberhasilan. (dalam Miftahudin 2009 Arikunto, 2005:10-11).

Menurut Fajriyah (2014 : 3) Evaluasi memiliki pengertian yang berbeda – beda, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya menurut Stufflebeam dalam Lababa (2008), evaluasi adalah *"the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives,"* Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Masih dalam Lababa (2008), definisi evaluasi menurut Worthen dan Sanders adalah "evaluasi sebagai usaha mencari sesuatu yang berharga *(worth)*. Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur tertentu"

Pendapat lain tentang definis evaluasi dikemukakan oleh Arikunto dan Cepi (2008 : 2), yaitu:

> Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Manakala (2003 : 120), dalam Menurut Fajriyah (2014 : 3) mengatakan pula bahwa:

> Evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua hal atau lebih yang merupakan alternatif yang diinginkan, karena penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternatif-alternatif itu harus diberi nilai relatif, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan.

Evaluasi dapat dipilah-pilah menurut beberapa hal, seperti menurut jenis yang dievaluasi, menurut pelakunya (evaluator), menurut lingkupnya, menurut kadar kedalamannya, menurut masa atau periodenya. Dalam Modul Akuntabilitas Kinerja, dikemukakan bahwa evaluasi dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, misalnya: evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dapat meliputi evaluasi yang dilakukan sebelum program berjalan, atau sedang dalam pelaksanaan, atau setelah program selesai dan dapat diteliti hasil dan dampaknya.

Arikunto menyebutnya dengan tes formatif yaitu untuk mengetahui sejauh mana tujuan telah terbentuk seperti: ulangan harian (dalam Miftahudin 2009 Arikunto, 2005:36). Sedang tes sumatif setelah pemberian sekelompok program atau program yang lebih besar, seperti: ulangan umum (dalam Miftahudin 2009 Arikunto, 2005:39). dalam Miftahudin 2009 Menurut Wayne (2008:549- 552), ada dua macam model evaluasi kebijakan yang digunakan yaitu: Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan atau program yang sedang diimplementasikan merupakan analisis tentang "seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasi".

Pada fase implementasi memerlukan evaluasi "formatif" yang akan memonitor cara dimana sebuah program dikelola atau diatur untuk menghasilkan umpan balik yang bisa berfungsi untuk meningkatkan proses implementasi. Rossi dan Freeman dalam buku Parsons mendeskripsikan model evaluasi ini sebagai evaluasi pada tiga persoalan yaitu : sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat, apakah penyampaian pelayanannya konsisten degan

spesifikasi desain program atau tidak Sumber daya apa yang dikeluarkan dalam melakukan program. Sedangkan Evaluasi Surmatif Evaluasi adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur bagaimana kebijakan atau program secara aktual berdampak pada problem yang ditanganinya.

Model evaluasi ini pada dasarnya adalah model penelitian komparatif yang mengukur beberapa persoalan yaitu membandingkan sebelum dan sesudah program diimplentasikan, membandingkan dampak intervensi terhadap satu kelompok dengan kelompok lain atau antara satu kelompok yang menjadi subjek intervensi dan kelompok lain yang tidak (kelompok kontrol), membandingkan apa yang terjadi dengan yang apa yang mungkin terjadi tanpa intervensi atau membandingkan bagaimana bagian – bagian yang berbeda dalam satu wilayah mengalami dampak yang berbeda – beda akibat dari kebijakan yang sama.

Menurut Peneliti evaluasi adalah proses membanding antara kegiatan yang direncanakan dengan kegiatan yang senyatanya dapat dilaksanakan. Artinya evaluator tidak mungkin melakukan tugasnya tanpa terlebih dahulu mengetahui tentang rencana kegiatan dari suatu sasaran evaluasi dan informasi tentang realisasi dari rencana yang telah ditetapkan dalam keadaan selesai berproses.

Terdapat enam hal tujuan evaluasi yang disampaikan dalam Miftahudin 2009 Sudjana (2006:48), yaitu untuk :

a. Memberikan masukan bagi perencanaan program;
b. Menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program;
c. Memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program;
d. Memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program;

e. Memberikan masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan (pengawasan, supervisi, dan monitoring) bagi penyelenggara, pengelola dan pelaksana program.

Dalam Miftahudin 2009 Arikunto dan Cepi (2004:13) menyatakan bahwa terdapat dua macam tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum diarahkan pada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus diarahkan pada masing-masing komponen. Dalam hak tersebut keduanya menyarankan agar dapat melakukan tugasnya, maka seorang evaluator program dituntut untuk mampu mengenali komponen-komponen program.

Husein Kosasih mengemukakan bahwa evaluasi bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. (dalam Miftahudin 2009 Kosasih, 2004:3)

William N. Dunn menyebutkan bahwa evaluasi bertujuan : (1) memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan public, (2) memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, (3) memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. (dalam Miftahudin 2009 Dunn, 2003:609).

Menurut Brewer dalam Studying Public Policy, proses kebijakan terdiri atas 6 tahap: 1) permulaan /penanaman (invensi), 2) estimasi (perkiraan), 3) seleksi (pemilihan), 4) implementasi (penerapan), 5) evaluasi (penilaian), 6)

terminasi (penyelesaian). Dalam pandangan Brewer, invensi atau permulaan mengacu pada tahap paling awal dalam rangkain tersebut ketika masalah akan dirumuskan. Dia menjelaskan bahwa tahap ini dapat digolongkan sebagai tahap perumusan masalah dan pencarian solusi. Tahap kedua adalah perkiraan yang menghitung dan memperkirakan tentang resiko, biaya, dan manfaat yang berhubungan dengan berbagai solusi yang akan diterapkan pada tahap sebelumnya.

Tahap ini akan melibatkan evaluasi teknis dan pilihan normatif. Tujuan tahap ini adalah untuk mempersempit pilihan-pilihan yang masuk akal dengan tidak memasukkan pilihan-pilihan yang tidak memungkinkan dan menggunakan pilihan-pilihan yang mungkin saja dapat diterapkan. Tahap ketiga terdiri atas pengambilan satu atau kombinasi solusi yang diterapkan hingga akhir tahap ini. ketiga tahap selanjutnya adalah tahap yang memberikan pilihan-pilihan, mengevaluasi hasil dan seluruh proses dan pemberhentian kebijakan untuk mendapatkan kesimpulan yang dicapai dari evaluasi tersebut.

Meskipun ada fakta bahwa seringkali muncul kekecewaan terhadap kerangka analisis kebijakan yang dominan, yakni analisis pengambilan keputusan rasional, namun pendekatan tahapan (stagist) atau siklus tetap menjadi basis untuk analisis proses kebijakan dan analisis di dalam atau untuk proses kebijakan yang akan datang. Laswell (dalam Miftahudin 2009 Parsons 2011 : 81) berpendapat tahapan proses kebijakan terdiri dari: inteligensi, promosi, preskripsi, invokasi (invocation), aplikasi, penghentian (termination), dan penilaian (appraisal). Selain itu ada pula pendapat Anderson (dalam Miftahudin 2009 Santosa, 2008 : 36)

mengemukakan bahwa terdapat lima tahapan kebijakan yaitu: Formasi masalah, Formulasi, Adopsi, Implementasi, Evaluasi.

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan beberapa variable yang harus dikaji. Beberapa ahli mengkaji kebijakan publik dan membaginya kedalam proses – proses penyusunan kebijakan ke dalam beberapa tahap dengan tujuan untuk mempermudah kita dalam mengkaji kebijakan publik. Melihat pendapat beberapa ahli tentang tahapan-tahapan kebijakan dengan urutan yang berbeda. Dunn memiliki pendapat tentang tahapan kebijakan publik sebagai berikut:

Dari bagan diatas terdapat tahapan – tahapan dalam kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tahap Penyusunan Agenda yang mana setiap yang mengambil kebijakan akan menempatkan masalah – masalah yang akan dijadikan dalam agenda publik. Sebelum menetapkan masalah – masalah yang akan masuk dalam agenda publik, masalah – masalah yang ada di publik akan berkompetisi terlebih dahulu sehingga akhirnya nanti akan ada beberapa masalah yang masuk dalam agenda kebijakan para perumus kebijakan. Tahap agenda ini

ada masalah yang tidak disentuh sama sekali, ada pula masalah yang dijadikan fokus dalam agenda serta terdapat pula masalah yang akan ditunda untuk waktu yang lama karena alasan-alasan tertentu.

b. Formulasi Kebijakan yang mana masalah yang telah masuk dalam agenda kebijakan kemudian akan dibahas oleh para pembuat kebijakan, masalah tersebut kemudian akan dicari bentuk-bentuk cara untuk penyelesaiannya. Pemecahan masalah Perumusan Agenda tersebut berasal dari alternatif-alternatif (policy alternative) yang ada. Penyeleksian alternatif-alternatif tersebut sama halnya dengan menetapkan masalah yang ditetapkan sebagai agenda publik yaitu beberapa alternatif bersaing untuk bisa diambil dan ditetapkan sebagai penyelesaian dari permasalahan. Pada tahapan formulasi ini para aktor memainkan perannya untuk mengusulkan pemecahan masalah yang terbaik.
c. Tahap Adopsi Kebijakan merupakan alternatif-alternatif yang ditawarkan para perumus kebijakan tentu banyak, dan dari sekian banyak alternative yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, hanya salah satu yang dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara pimpinan atau keputusan peradilan.
d. Tahap Implementasi Kebijakan merupakan suatu program kebijakan hanya akan menjadi dokumen serta arsip-arsip yang tertata rapi jika kebijakan tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen – agen pemerintah sampai pada tingkat bawah sehingga diharapkan kebijakan yang sudah terbentuk tidak sia – sia dan berjalan dengan baik dalam tahap implementasi berbagai kepentingan akan bersaing yang pada nantinya akan bermunculan para pelaksana yang mendukung kebijakan tersebut dan para pelaksana yang menolak dengan kebijakan tersebut.
e. Tahap Evaluasi Kebijakan, Tahap evaluasi ini kebijakan yang telah diimplementasikan akan dinilai tingkat keberhasilannya untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak yang baik terutama untuk mengatasi masalah publik. Ketika pada tahap ini akan ditetapkan ukuran atau indikator - indikator yang menjadi alat unuk mengukur suatu kebijakan apakah berhasil atau gagal.

Beberapa tahap – tahap kebijakan diatas bisa diartikan bahwa tahap - tahap kebijakan merupakan suatu proses terbentuknya suatu kebijakan dimana pada setiap tahapan satu dengan yang lainnya sangat berkaitan. Untuk penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada proses evaluasi kebijakan. Pada penelitian ini evaluasi kebijakan dipilih untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan retribusi kebersihan/persampahan Kota Tanjungpinang dengan

melihat sejauhmana kebijakan tersebut memecahkan masalah publik yang dihadapi saat ini.

3.1. Tujuan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienannya.

Dalam Miftahudin 2009 Abdulkahar dan Teguh (2002:132) menyatakan Evaluasi kebijakan setidak-tidaknya dimaksudkan untuk memenuhi tiga tujuan utama, yaitu: (1) untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya? (2) untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan; (3) untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang.

Sekalipun penerapan suatu kebijakan oleh pemerintah telah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuannya, namun tidak selalu penerapan tersebut dapat mewujudkan semua tujuan yang hendak dicapai. Terganggunya implementasi yang menjadikan tidak tercapainya tujuan kebijakan mungkin pula disebabkan oleh pengaruh dari berbagai kondisi lingkungan yang tidak teramalkan sebelumnya.

Menurut Crawford (2000 ; 30), tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah :

1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap prilaku hasil.
3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
4. untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan

Menurut Sofian, tujuan dari evaluasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu:

a. Bagaimana kinerja kebijakan publik? Jawabannya berkenaan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari outcome) terhadap variable independen tertentu
b. Faktor-faktor apa saja yang menimbulkan variasi itu? Jawabannya berkaitan dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi variasi outcome dari implementasi kebijakan.
c. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik? Pertanyaan ini berkenaan dengan "tugas" dari pengevaluasi untuk memilih variabel-variabel yang dapat diubah, atau actionable variabel – variabel yang bersifat natural atau variabel lain yang tidak dapat dan dimasukkan sebagai variabel evaluasi.

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson (Winarno; 2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

3.2. Metode Evaluasi Kebijakan

Edwar (Riant Nugroho, 2003:199) di sisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
b. Analisis terhadap masalah
c. Deskripsi dan standardisasi kegiatan
d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan atau karena penyebab yang lain
f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

Menurut Camp (1989) proses benchmarking dapat digolongkan menjadi empat tipe proses yaitu internal, kompetitif, fungsional dan proses umum (generic). Masing-masing memiliki hasil dan keuntungan khusus.

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yaitu:

a. Merancang bangun (design) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
b. Melaksanakan (aplication) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan (Tachjan, 2006:35)

Evaluasi kebijakan publik menurut Muhadjir dalam Widodo (2008:112), merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Bingham dan Felbinger, Howlet dan Ramesh (Nugroho 2011:676-677) mengelompokkan evaluasi menjadi tiga, yaitu:

a. Evaluasi administratif, yang berkenaan dengan evaluasi sisi administrative anggaran, efisiensi, biaya dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan:
    1. Effort evaluation, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan
    2. Performance evaluation, yang menilai keluaran (output) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan
    3. Adequacy of performance evaluation atau effectiveness evaluation, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan
    4. Efficiency evaluation, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut.
    5. Process evaluations, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program

Dalam organisasi yang besar banyak operasi-operasi di set-up untuk menghasilkan fungsi yang sama, pusat distribusi, fungsi pemasukan order, dan operasi pelayanan adalah beberapa contohnya.

b. Evaluasi judicial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.
c. Evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

Dalam Miftahudin 2009 Menurut Dunn (2000:601) menyatakan bahwa evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pada dasarnya nilai juga dapat dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Evaluasi kebijakan adalah proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil, yaitu membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan (dalam Miftahudin 2009 Sundarso, dkk.2006:22).

3.3. Tipe Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn, berdasar waktu pelaksanaannya, evaluasi kebijakan dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:

a. Evaluasi sebelum dilaksanakan (evaluasi summative),
b. Evaluasi pada saat dilaksanakan (evaluasi proses), dan
c. Evaluasi setelah kebijakan {evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan atau evaluasi impak/pengaruh (outcome) kebijakan}.

Pada prinsipnya tipe evaluasi kebijakan sangat bervariasi tergantung dari tujuan dan level yang akan dicapai. Dari segi waktu, evaluasi dibagi menjadi

dua yaitu evaluasi preventif kebijakan dan evaluasi sumatif kebijakan. Dalam penelitian ini evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi setelah kebijakan.

Jamed (Nugroho, 2009:541) membagi evaluasi kebijakan public menjadi tiga. Tipe pertama, evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional. Kedua, evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan. Ketiga, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai. Sementara itu, Bingham dan Felbinger (Nugroho, 2009:542) membagi evaluasi kebijakan menjadi empat jenis, yaitu:

a. Evaluasi proses, yang fokus pada bagaimana proses implementasi suatu kebijakan
b. Evaluasi impak, yang fokus pada hasil akhir suatu kebijakan
c. Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan
d. Meta-evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait.

James dalam Winarno (2008 : 229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing – masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

a. Tipe pertama, Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
b. Tipe kedua merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program – program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.
c. Tipe ketiga Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program – program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan - tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Dalam buku Nugroho (2011: 676), mempunyai empat dasar tipe evaluasi sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Keempat tipe ini adalah evaluasi kecocokan (appropriateness evaluation), evaluasi efektivitas (effectiveness evaluation), evaluasi efisiensi (efficiency evaluation) dan evaluasi meta (meta-evaluations).

Tabel II.I
Tipe Evaluasi Kebijakan

No	Tipe Evaluasi	Pengujian Dasar
1	Evaluasi Kecocokan	a. Apakah kebijakan yang sedang berlangsung cocok untuk dipertahankan ? b. Apakah kebijakan baru dibutuhkan untuk mengganti kebijakan ini ? c. Siapakah semestinya yang menjalankan kebijakan public tersebut : pemerintah atau sektor swasta ?
2	Evaluasi Efektivitas	a. Apakah program kebijakan tersebut menghasilkan hasil dan dampak kebijakan yang diharapkan ? b. Apakah tujuan yang dicapai dapat terwujud ? c. Apakah dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan ?
3	Evaluasi Efisiensi	a. Apakah input yang digunakan telah mendapatkan hasil sebanding dengan output kebijakannya ? b. Apakah cukup efisien dalam penggunaan keuangan publik untuk mencapai dampak kebijakan tersebut?
4	Evaluasi Meta	a. Apakah evaluasi yang dilakukan oleh lembaga berwenang sudah professional ? b. Apakah Evaluasi tersebut sensitive terhadap kondisi sosial, kultural dan lingkungan ? c. Apakah evaluasi tersebut menghasilkan laporan yang mempengaruhi pilihan-pilihan manajerial ?

Sumber : dalam Miftahudin 2009 Badjuri & Yuwono (2002:136-138)

Dalam Miftahudin 2009 Menurut Wayne (2008:549-552), ada dua macam model evaluasi kebijakan yang digunakan yaitu:

a. Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan atau program yang sedang diimplementasikan merupakan analisis tentang "seberapa jauh sebuah program diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasi". Pada fase implementasi

memerlukan evaluasi "formatif" yang akan memonitor cara dimana sebuah program dikelola atau diatur untuk menghasilkan umpan balik yang bisa berfungsi untuk meningkatkan proses implementasi, model evaluasi ini sebagai evaluasi pada tiga persoalan yaitu salah satunya sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat, apakah penyampaian pelayanannya konsisten degan spesifikasi desain program atau tidak dan Sumber daya apa yang dikeluarkan dalam melakukan program.

b. Evaluasi Sumatif

Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur bagaimana kebijakan atau program secara aktual berdampak pada problem yang ditanganinya. Model evaluasi ini pada dasarnya adalah model penelitian komparatif yang mengukur beberapa persoalan yaitu: membandingkan sebelum dan sesudah program diimplentasikan, membandingkan dampak intervensi terhadap satu kelompok dengan kelompok lain atau antara satu kelompok yang menjadi subjek intervensi dan kelompok lain yang tidak (kelompok kontrol), membandingkan apa yang terjadi dengan yang apa yang mungkin terjadi tanpa intervensi dan membandingkan bagaiamana bagian – bagian yang berbeda dalam satu wilayah mengalami dampak yang berbeda – beda akibat dari kebijakan yang sama.

Berdasarkan tipe evaluasi kebijakan maka penelitian ini menggunakan tipe evaluasi efektivitas. Hal ini dikarenakan penelitian ingin mengetahui program kebijakan tersebut menghasilkan hasil dan dampak kebijakan yang diharapkan, tujuan yang dicapai dapat terwujud, dan dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan.

3.4. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Dalam Miftahudin 2009 Menurut Bridgman & Davis (2000:130) Pengukuran evaluasi kebijakan secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu : (1) indikator input, (2) indikator process, (3) indikator outputs dan (4) indikator outcomes. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Indikator input memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.
2. Indikator proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada

masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.

3. Indikator outputs (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
4. Indikator outcomes (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Untuk memudahkan tentang pengukuran evaluasi kebijakan Badjuri &

Yuwono (2002:140-141) menyajikan tabel indikator evaluasi kebijakan sebagai berikut :

Tabel II.2
Indikator Evaluasi Kebijakan

No	Indikator	Fokus Penilaian
1	Input	a. apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan? b. berapakah SDM (sumber daya), uang atau infrastruktur pendukung lain yang diperlukan?
2	Process	a. bagaimanakah sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat ? b. bagaimanakah efektivitas dan efisiensi dari metode / cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut ?
3	Output	a. apakah hasil atau produk yang dihasilkan sebuah kebijakan publik ? b. berapa orang yang berhasil mengikuti program / kebijakan tersebut ?
4	Outcomes	a. apakah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan ? b. berapa banyak dampak positif yang dihasilkan ? c. adakah dampak negatifnya ? seberapa seriuskah ?

Sumber : Badjuri & Yuwono (2002:140-141)

Kriteria evaluasi oleh Dunn (Nugroho, 2009:537) menggambarkan kriteria – kriteria kebijakan publik disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II.3

Kriteria Evaluasi

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber : Dunn (Nugroho, 2009:537)

Dengan beberapa pengertian Evaluasi dari pendapat para ahli diatas peneliti mengambil kerangka teori yang berkenaan evaluasi yang dikemukaakn William N Dunn, sehingga dapat dikaitkan dengan penelitian dalam hal evaluasi system pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang.

Dengan menerapkan teori Dunn, peneliti bermaksud menjabarkan bagaimana desain penelitian ini agar terdapat batasan masalah dan tidak terjadi kesalahpahaman antara variabel, dengan menggunakan konsep dari dunn peneliti menganggap teori dunn ini yang tepat digunakan peneliti kali ini dengan adanya fenomena efektivitas, dimana maksud dari efektivitas menurut dunn merupakan

Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai, untuk menjawab hasil pertanyaan dunn tersebut menerapkan indikator untuk mengetahui jawaban tersebut adalah Tercapainya Tujuan, maksud tercapainya tujuan tersebut akan mengetahui sistem Pengelolaan Persampahan yang terealisasi dengan baik.

Dengan mengetahui indikator dalam penelitian peneliti akan mengetahui efektif atau tidaknya dengan mengukur indikator dari tercapainya tujuan. Indikator yang kedua untuk mengetahui efektifitas menurut Dunn adalah Kejelasan Sasaran dengan menemukan terdapat Kesesuaian antara Konsep Kebijakan dan Hasil. Dengan diketahui kesusuaian antara konsep kebijakan dan hasil ini lah dapat dilihat bahwa sistem pengelolaan persampahan efektif atau tidaknya berdasarkan teori dunn tersebut.

Selanjutnya Dunn mengemukakan indikator evaluasi adalah efisiensi merupakan Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan itu dunn menggunakan indikator untuk mengukur efisiensi yaitu Waktu Pelaksanaan dengan mengetahui Pengelolaan Persampahan oleh DPRKPKP Lebih Sesuai dan Tepat, dengan diketahuinya nantinya pengelolaan persampahan yang lebih sesuai dan tepat seperti apa dan hasil tersebut lah kita mengetahui bahwa system pengelolaan persampahan itu efisien atau tidak.

Selanjutnya selain efisiensi Dunn juga mengemukaan bahwa indikator untuk mengukur evaluasi adalah Kecukupan yang mana kecukupan merupakan Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah, dengan ingin diketahuinya pencapaian hasil yang diinginkan dunn mengemukakan bahwa harus mengetahui kepuasan terhadap hasil dimana yang akan di teliti oleh peneliti

adalah Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Dapat terlaksana sesuai sasaran, dengan hal ini akan terjawab nantinya bagaimana kecukupan yang dimaksudkan dunn tersebut.

Pemerataan yang dikemukakan oleh dunn merupakan Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda untuk mengetahui pemerataan diperlukan indikator untuk mengetahui pemerataan yang di laksanakan dalam system pengelolaan persampahan dimana indikator tersebut adalah Tidak Mementingkan Kelompok Tertentu. Dengan demikian tidak mementingkan kelompok tertentu kita harus mengetahui bagaimana Sistem Pengelolaan Persampahan yang dapat dijalankan secara menyeluruh. Pada akhir nya nanti peneliti akan mengetahui pemerataan dalam konsep teori dunn tersebut.

Responsivitas dalam indikator evaluasi menurut dunn merupakan Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Untuk mengetahui responsivitas yang dimaksud dunn ini perlunya Keikutsertaan dan partisipasi dimana peneliti ingin meneliti Lemahnya penerapan dan pelaksanaan sistem pengelolaan persampahan

Ketepatan dalam teori dunn merupakan Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai, untuk mengetahui indikator ketepatan peneliti harus mengetahui dua hal yaitu keberhasilan dan kegunaan. Keberhasilan ini akan melihat Berhasilnya Penerapan Sistem Pengelolaan Persampahan, sedangkan kegunaan dalam hal ini yang akan dilihat Berhasilnya Penerapan Sistem Pengelolaan Persampahan

Dengan demikian dari beberapa indikator yang dikemukakan Dunn diatas menurut peneliti teori dunn merupakan teori yang cukup tepat untuk mengevaluasi system pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang dibandingkan teori menurut pendapat ahli lainnya seperti Edwar (Nugroho, 2003:199) di sisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan antara lain : Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi, Analisis terhadap masalah, Deskripsi dan standardisasi kegiatan, Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi, Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan atau karena penyebab yang lain Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak hanya sebatas itu sehingga peneliti menganggap belum tepat ketika peneliti ingin meneliti evaluasi system pengeloaan persampahan di Kota Tanjungpinang.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian kali ini peneliti mengambil beberapa penelitian yang terdahulu yang relevan terkait tentang sistem pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang yaitu jurnal Syahriar Tato Tahun 2015 dengan Judul *"Evaluasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Gowa Studi Kasus Kecamatan Somba Opu"* dengan hasil : a. analisis tingkat pencapaian pengelolaan persampahan dari hasil kuesioner dan menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Dinas Pekerjaan Umum Bidang Persampahan, metode ini dilakukan untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana persampahan dilokasi penelitian. b. analisis Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif, analisis deskriptif adalah analisis dengan menggambarkan atau menguraikan secara jelas kondisi yang

terjadi dilokasi penelitian berdasarkan ketentuan-ketentuan teknik pengelolaan sampah yang ada dan dari hasil analisis tingkat pencapaian menjadi pola penanganan pengelolaan sampah di Kecamatan Somba Opu. c. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori yang ingin mengetahui aspek pengelolaan persampahan dimulai dari aspek Teknis Operasional, Aspek Kelembagaan, Aspek Peran Serta Masyarakat, Aspek Hukum, Undang-Undang, Peraturan Serta Kebijakan Daerah, serta Aspek Pembiayaan.

Selanjutnya peneliti mengambil dari Jurnal Ismeidi Tahun 2016 dengan Judul "*Evaluasi Sistem Pembuangan Akhir Sampah di TPA Ngadiro Kota Wonogiri*" dengan hasil : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri selaku instansi pengelola persampahan belum mampu memberikan pelayanan sampah secara maksimal pada seluruh wilayah Kota Wonogiri. Hal ini terlihat dari jumlah timbulan sampah yang mampu terangkut ke TPA oleh truck pengangkut sampah yang hanya sebesar 45% dari keseluruhan timbulan sampah yang dihasilkan penduduk. Adanya keterbatasan dalam pendanaan menyebabkan kinerja pihak pengelola sampah yang tidak maksimal sehingga belum mampu menjangkau ke seluruh wilayah Kota Wonogiri dan sekitarnya, serta penelitian dalam ini menggunakan teori analisa swot yang berbicara mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, serta stategi dari masing-masing tersebut.

Selanjutnya peneliti mengambil dari salah satu jurnal Silvia Yulita Ratih tyang berjudul "Evaluasi Metode Pengelolaan Sampah Untuk Umur Layan Di Tpa Putri Cempo" penelitian ini menemukan : a. Angka pelayanan angkutan transportasi sampah 76% sudah diatas standart yang di syaratkan yaitu 60 %.

Namun angka pelayanan angkutan di atas hanya tercermin pada angkutan sampah dari TPS ke TPA, belum mencerminkan sampah dari rumah tangga ke TPS, b. Prediksi umur layanan TPA Putri Cempo bila menggunakan pengelolaan sampah terpadu dapat beroperasi pada awal tahun 2011 maka umur layan TPA Putri Cempo bisa mencapai 05 Oktober 2017, sehingga umur layan TPA Putri Cempo selama 30 tahun 278 hari, c. analisis terhadap pengelolaan sampah didapatkan hasil bahwa persentase pengurangan sampah dengan pengelolaan sampah sejak dari TPS dan melibatkan masyarakat dapat mengurangi volume sampah yang masuk TPA sampai 64,17%. Serta menggunakan teori yang mengenai sistem pengolahan sampah di TPA yaitu Pemadatan *(bail press)*, Lahan urugan terbuka *(open dumping)*, Lahan urugan terkendali, Lahan urugan saniter *(sanitary landfill)*, Pembakaran *(incineratting)*, Pengkomposan *(composting)*.

Selanjutnya juga peneliti mengambil dari Tesis Indra Yones dari Universitas Diponegoro Semarang dengan Judul *"Kajian Pengelolaan Sampah Di Kota Ranai Ibu Kota Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau"* dimana hasil dan temuan dari penelitian ini adalah : a. Tingkat dan Wilayah layanan pengelolaan sampah yang telah dilakukan pada setiap sumber timbulan sampah, b. Kondisi sarana dan prasarana serta tenaga kerja yang terkait dengan pelyanan pembuangan sampah, c. Kondisi sistem pengelolaan sampah pada umumnya dan sub system, d. Susunan Rencana pengelolaan persampahan. d. dalam penelitian ini dilakukan teori tidak jauh beda dari penelitian diatas penelitian ini hanya membahas aspek pengelolaan persampahan aspek Teknis Operasional, Aspek

Kelembagaan, Aspek Peran Serta Masyarakat, Aspek Hukum, Undang-Undang, Peraturan Serta Kebijakan Daerah, serta Aspek Pembiayaan.

Dengan demikian yang terakhir peneliti mengambil dari Tesis Tengku Dahlan dengan judul "Peningkatan Petugas Sampah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Tanjungpinang". dimana hasil dan temuan penelitian: a. masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat pada bahaya limbah sampah, sehingga mereka menyerahkan masalah kebersihan lingkungan hanya kepada petugas kebersihan. Diikuti pengawasan yang perlu ditingkat oleh lembaga yang mengelola persampahan. b. waktu kerja yang sempit, sehingga para pekerja kebersihan tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dan pekerjaan sampingan yang dominan, c. dalam mengelola sampah di Kota Tanjungpinang kelembagaan masih dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tanjungpinang serta pembayaran upah yang masih perlu peningkatan. d. teori yang digunakan dimana faktor – faktor yang berperan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Tanjungpinang dengan melihat masyarakat perkotaan, persepsi dan perilaku masyarakat, pengelolaan persampahan.

Tabel. II.4
Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang akan di lakukan

NO	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	*"Evaluasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Gowa Studi Kasus Kecamatan Somba Opu"*	1. analisis tingkat pencapaian pengelolaan persampahan dari hasil kuesioner dan menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Dinas Pekerjaan Umum Bidang Persampahan, metode ini dilakukan untuk mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana persampahan dilokasi penelitian. 2. analisis Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif, analisis deskriptif adalah analisis dengan menggambarkan atau menguraikan secara jelas kondisi yang terjadi dilokasi penelitian berdasarkan ketentuan-ketentuan teknik pengelolaan sampah yang ada dan dari hasil analisis tingkat pencapaian	1. Terdapat persamaan baik dalam tema penelitian yaitu Sistem Pengelolaan Persampahan 2. Terdapat persamaan dalam metodologi penelitian yaitu penelitian Kualitatif.	1. Terdapat perbedaan dalam hal objek penelitian. 2. Penelitian Terdahulu memfokuskan terhadap pencapaian pengelolaan persampahan 3. Penelitian yang akan dilakukan lebih fokus tehadap system pengelolaan persampahan 4. Teori dalam penelitian menggunakan teori dunn sedangkan Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori yang ingin mengetahui aspek pengelolaan persampahan dimulai dari aspek Teknis Operasional, Aspek Kelembagaan, Aspek Peran Serta Masyarakat, Aspek Hukum, Undang-Undang, Peraturan Serta Kebijakan Daerah, serta Aspek Pembiayaan.

		menjadi pola penanganan pengelolaan sampah di Kecamatan Somba Opu. 3. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori yang ingin mengetahui aspek pengelolaan persampahan dimulai dari aspek Teknis Operasional, Aspek Kelembagaan, Aspek Peran Serta Masyarakat, Aspek Hukum, Undang-Undang, Peraturan Serta Kebijakan Daerah, serta Aspek Pembiayaan.		
2	*"Evaluasi Sistem Pembuangan Akhir Sampah di TPA Ngadiro Kota Wonogiri"*	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri selaku instansi pengelola persampahan belum mampu memberikan pelayanan sampah secara maksimal pada seluruh wilayah Kota Wonogiri. Hal ini terlihat dari jumlah timbulan sampah yang mampu terangkut ke TPA oleh truck pengangkut sampah yang hanya sebesar 45% dari keseluruhan timbulan sampah yang	1. Terdapat persamaan baik dalam tema penelitian yaitu Sistem Pengelolaan Persampahan Tersebut 2. Terdapat persamaan dalam metodologi penelitian yaitu penelitian Kualitatif.	1. Terdapat perbedaan dalam hal objek penelitian. 2. Penelitian Terdahulu memfokuskan terhadap Sistem Pembuangan Sampah di TPA 3. Penelitian yang akan dilakukan lebih fokus tehadap system pengelolaan sampah di Kota Tanjungpinang. 4. Teori yang

		dihasilkan penduduk. Adanya keterbatasan dalam pendanaan menyebabkan kinerja pihak pengelola sampah yang tidak maksimal sehingga belum mampu menjangkau ke seluruh wilayah Kota Wonogiri dan sekitarnya. penelitian dalam ini menggunakan teori analisa swot yang berbicara mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, serta stategi dari masing-masing tersebut.		digunakan evaluasi dunn sedangkan penelitian dalam ini menggunakan teori analisa swot yang berbicara mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, serta stategi dari masing-masing tersebut.
3.	*"Evaluasi Metode Pengelolaan Sampah Untuk Umur Layan Di Tpa Putri Cempo"*	1. Angka pelayanan angkutan transportasi sampah 76% sudah diatas standart yang di syaratkan yaitu 60 %. Namun angka pelayanan angkutan di atas hanya tercermin pada angkutan sampah dari TPS ke TPA, belum mencerminkan sampah dari rumah tangga ke TPS, 2. Prediksi umur layanan TPA Putri Cempo bila menggunakan pengelolaan sampah terpadu dapat beroperasi pada awal tahun 2011 maka umur	1. Terdapat persamaan baik dalam tema penelitian yaitu Sistem Pengelolaan Persampahan Tersebut 2. Terdapat persampahan dimana melihat pengelolaan persampahan di TPA di Kota Tanjungpinang	1. Terdapat perbedaan dalam hal objek penelitian. 2. Penelitian Terdahulu memfokuskan terhadap Sistem Pembuangan Sampah di TPA 3. Penelitian yang akan dilakukan lebih fokus tehadap system pengelolaan sampah nya bukan hanya di TPA Kota Tanjungpinang. 4. Teori yang digunakan evaluasi dunn sedangkan penelitian dalam ini teori yang mengenai sistem pengolahan sampah di TPA yaitu Pemadatan *(bail*

		layan TPA Putri Cempo bisa mencapai 05 Oktober 2017, sehingga umur layan TPA Putri Cempo selama 30 tahun 278 hari, 3. analisis terhadap pengelolaan sampah didapatkan hasil bahwa persentase pengurangan sampah dengan pengelolaan sampah sejak dari TPS dan melibatkan masyarakat dapat mengurangi volume sampah yang masuk TPA sampai 64,17% 4. menggunakan teori yang mengenai sistem pengolahan sampah di TPA yaitu Pemadatan *(bail press)*, Lahan urugan terbuka *(open dumping)*, Lahan urugan terkendali, Lahan urugan saniter *(sanitary landfill)*, Pembakaran *(incineratting)*, Pengkomposan *(composting)*.		*press)*, Lahan urugan terbuka *(open dumping)*, Lahan urugan terkendali, Lahan urugan saniter *(sanitary landfill)*, Pembakaran *(incineratting)*, Pengkomposan *(composting)*.

4.	*"Kajian Pengelolaan Sampah Di Kota Ranai Ibu Kota Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau"*	a. Tingkat dan Wilayah layanan pengelolaan sampah yang telah dilakukan pada setiap sumber timbulan sampah, b. Kondisi sarana dan prasarana serta tenaga kerja yang terkait dengan pelyanan pembuangan sampah, c. Kondisi system pengelolaan sampah pada umumnya dan sub system d. Susunan Rencana pengelolaan persampahan. e. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori yang ingin mengetahui aspek pengelolaan persampahan dimulai dari aspek Teknis Operasional, Aspek Kelembagaan, Aspek Peran Serta Masyarakat, Aspek Hukum, Undang-Undang, Peraturan Serta Kebijakan Daerah, serta Aspek Pembiayaan.	1. Terdapat persamaan dalam tema penelitian yaitu Sistem Pengelolaan Sampah 2. Terdapat persamaan dalam metodologi penelitian yaitu penelitian Kualitatif.	1. Terdapat perbedaan dalam hal objek penelitian. 2. Penelitian terdahulu memfokuskan pada Kajian Pengelolaan Persampahan 3. Penelitian yang akan di lakukan lebih fokus tehadap Evaluasi Terhadap Sistem Pengelolaan Persampahan 4. Teori yang digunakan evaluasi dunn sedangkan penelitian dalam ini teori yang ingin mengetahui aspek pengelolaan persampahan dimulai dari aspek Teknis Operasional, Aspek Kelembagaan, Aspek Peran Serta Masyarakat, Aspek Hukum, Undang-Undang, Peraturan Serta Kebijakan Daerah, serta Aspek Pembiayaan.

5.	*"Peningkatan Petugas Sampah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Tanjungpinang"*	a. masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat pada bahaya limbah sampah, sehingga mereka menyerahkan masalah kebersihan lingkungan hanya kepada petugas kebersihan. Diikuti pengawasan yang perlu ditingkat oleh lembaga yang mengelola persampahan. b. waktu kerja yang sempit, sehingga para pekerja kebersihan tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dan pekerjaan sampingan yang dominan, c. dalam mengelola sampah di Kota Tanjungpinang kelembagaan masih dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tanjungpinang serta pembayaran upah yang masih perlu peningkatan. d. teori yang digunakan dimana	a. Terdapat persamaan dalam tema penelitian yaitu Pengelolaan Sampah b. Terdapat persamaan dalam metodologi penelitian yaitu penelitian Kualitatif.	a. Terdapat perbedaan dalam hal objek penelitian. b. Penelitian terdahulu memfokuskan pada Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah c. Penelitian yang akan di lakukan lebih fokus tehadap Evaluasi Terhadap Sistem Pengelolaan Persampahan d. Teori yang digunakan evaluasi dunn sedangkan penelitian dalam ini teori yang digunakan dimana faktor – faktor yang berperan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Tanjungpinang dengan melihat masyarakat perkotaan, persepsi dan perilaku masyarakat, pengelolaan persampahan.

		faktor – faktor yang berperan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Tanjungpinang dengan melihat masyarakat perkotaan, persepsi dan perilaku masyarakat, pengelolaan persampahan.		

Melalui perbandingan penelitian yang relevan seperti diatas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang "Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan di Kota Tanjungpinang", dengan tujuan mendapatkan hasil yang berbeda dari penelitian terdahulu melalui pendekatan dan fokus penelitian yang berbeda pula.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka berpikir juga merupakan suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis.

Dengan menerapkan teori Dunn, peneliti bermaksud menjabarkan bagaimana desain penelitian ini agar terdapat batasan masalah dan tidak terjadi kesalahpahaman antara variabel, dengan menggunakan konsep dari dunn peneliti menganggap teori dunn ini yang tepat digunakan peneliti kali ini dengan adanya

fenomena efektivitas, dimana maksud dari efektivitas menurut dunn merupakan Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai, untuk menjawab hasil pertanyaan dunn tersebut menerapkan indikator untuk mengetahui jawaban tersebut adalah Tercapainya Tujuan maksud tercapainya tujuan tersebut akan mengetahui sistem Pengelolaan Persampahan yang terealisasi dengan baik.

Dengan mengetahui indikator dalam penelitian peneliti akan mengetahui efektif atau tidaknya dengan mengukur indikator dari tercapainya tujuan. Indikator yang kedua untuk mengetahui efektifitas menurut Dunn adalah Kejelasan Sasaran dengan menemukan terdapat Kesesuaian antara Konsep Kebijakan dan Hasil. Dengan diketahui kesusuaian antara konsep kebijakan dan hasil ini lah dapat dilihat bahwa sistem pengelolaan persampahan efektif atau tidaknya berdasarkan teori dunn tersebut.

Selanjutnya Dunn mengemukakan indikator evaluasi adalah efisiensi merupakan Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan itu dunn menggunakan indikator untuk mengukur efisiensi yaitu Waktu Pelaksanaan dengan mengetahui Pengelolaan Persampahan oleh DPRKPKP Lebih Susuai dan Tepat, dengan diketahuinya nantinya pengelolaan persampahan yang lebih sesuai dan tepat seperti apa dan hasil tersebut lah kita mengetahui bahwa system pengelolaan persampahan itu efisien atau tidak.

Selanjutnya selain efisiensi Dunn juga mengemukaan bahwa indikator untuk mengukur evaluasi adalah Kecukupan yang mana kecukupan merupakan Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah, dengan ingin diketahuinya pencapaian hasil yang diinginkan dunn mengemukakan bahwa

harus mengetahui kepuasan terhadap hasil dimana yang akan di teliti oleh peneliti adalah Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Dapat terlaksana sesuai sasaran, dengan hal ini akan terjawab nantinya bagaimana kecukupan yang dimaksudkan dunn tersebut.

Pemerataan yang dikemukakan oleh dunn merupakan Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda untuk mengetahui pemerataan diperlukan indikator untuk mengetahui pemerataan yang di laksanakan dalam system pengelolaan persampahan dimana indikator tersebut adalah Tidak Mementingkan Kelompok Tertentu. Dengan demikian tidak mementingkan kelompok tertentu kita harus mengetahui bagaimana Sistem Pengelolaan Persampahan yang dapat dijalankan secara menyeluruh. Pada akhir nya nanti peneliti akan mengetahui pemerataan dalam konsep teori dunn tersebut.

Responsivitas dalam indikator evaluasi menurut dunn merupakan Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Untuk mengetahui responsivitas yang dimaksud dunn ini perlunya Keikutsertaan dan partisipasi dimana peneliti ingin meneliti Lemahnya penerapan dan pelaksanaan sistem pengelolaan persampahan.

Ketepatan dalam teori dunn merupakan Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai, untuk mengetahui indikator ketepatan peneliti harus mengetahui dua hal yaitu keberhasilan dan kegunaan. Keberhasilan ini akan melihat Berhasilnya Penerapan Sistem Pengelolaan Persampahan, sedangkan kegunaan dalam hal ini yang akan dilihat Berhasilnya Penerapan Sistem Pengelolaan Persampahan

Dengan demikian dari beberapa indikator yang dikemukakan Dunn diatas menurut peneliti teori dunn merupakan teori yang cukup tepat untuk mengevaluasi system pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang dibandingkan teori menurut pendapat ahli lainnya seperti Edwar A. Suchman (Riant Nugroho, 2003:199) di sisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan antara lain : Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi, Analisis terhadap masalah, Deskripsi dan standardisasi kegiatan, Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi, Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan atau karena penyebab yang lain Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak hanya sebatas itu sehingga peneliti menganggap belum tepat ketika peneliti ingin meneliti evaluasi system pengeloaan persampahan di Kota Tanjungpinang. Sehingga pada akhirnya peneliti dapat mempermudah dengan melaksanakan penelitian yang menggunakan teori Dunn sehingga pada akhirnya mempermudah peneliti maka dapat digambarkan dalam bentuk gambar sebagai berikut:

Bagan II.1
Desain Penelitian

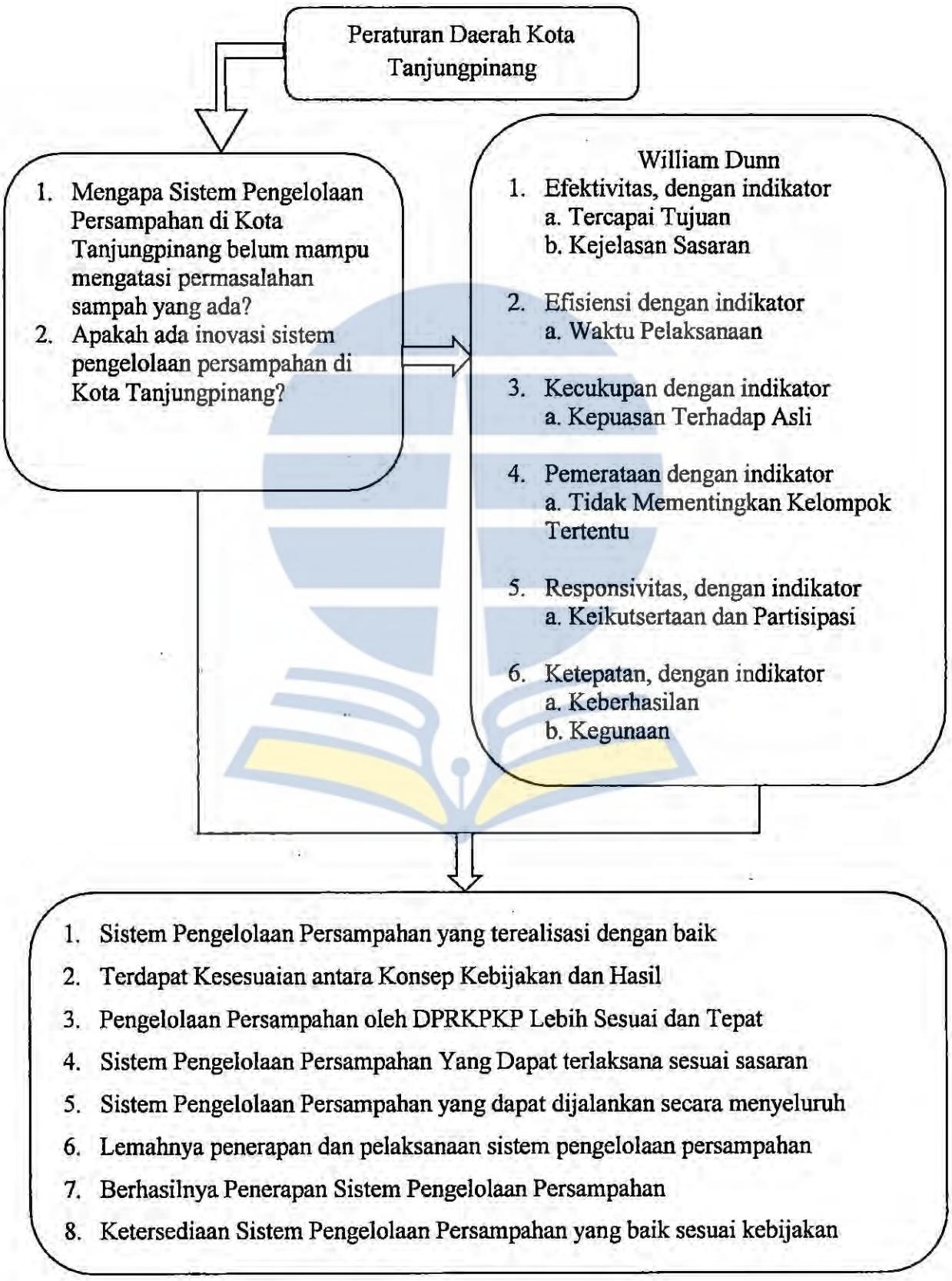

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Dimana menurut Faisal (Bungin; 2001:34) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk memahami suatu fenomena sosial sesuai dengan dunia pemahaman para pelakunya itu sendiri dengan menggunakan desain penelitian Kualitatif Deskriptif, penelitian ini yang pada umumnya tidak memerlukan hipotesis sehingga dalam penelitian ini tidak perlu merumuskan hipotesis dan pada akhirnya akan dapat diketahui bagaimana ungkapan serta catatan yang tersedia serta pengamatan melalui system pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang.

Metode penelitian dengan desain penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini karna memiliki kelebihan yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, presepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok dalam penerapan maupun pelaksanaan sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini sehingga dipandang tepat digunakan dalam meneliti mengenai evaluasi sistem pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang sehingga pada akhirnya peneliti mengatahui fenomena, peristiwa, aktivitas yang terjadi selama pelaksanaan sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang.

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi". Berkenaan dengan itu, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga kerja atau pegawai yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang dan seluruh petugas yang berpengaruh dalam pelayanan kebersihan / persampahan di Kota Tanjungpinang yang yang berjumlah 109 orang.

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut Sugiono (2000:57). Karena jumlah informan yang akan diambil maka peneliti mengambil data dengan menggunakan teknik Sampling Purposif yang mana yang dimaksud dengan Sampling Purposif merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang akan digunakan pada penelitian ini berjumlah 5 Orang dan Kepala Bidang Perkim dan Kebersihan dijadikan *Key Informan*, dimana penentuan Kepala Bidang Perkim dan Kebersihan sebagai *Key Informan* didasari pertimbangan bahwa kepala bidang dalam hal ini adalah orang / *person* yang memiliki peran yang sangat besar, yang juga bertindak sebagai *eksekutor* / pelaksana kebijakan – kebijakan yang telah dirumuskan, kepala bidang juga adalah orang yang mengetahui secara langsung kekurangan serta kelebihan dari sistem yang telah dibuat, sehingga untuk kemajuan serta perbaikan sistem yang akan datang, kepala bidang dapat menjadi pemberi pertimbangan dan masukan terhadap perbaikan sistem

pengelolaan persamphan di Kota Tanjungpinang, dimana masing-masing karakteristik informan dapat dilihat di tabel dibawah ini :

Tabel III. 1
Karakteristik Informan Berdasarkan
Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Informan (Orang)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	4	60,00
2.	Perempuan	1	40,00
Jumlah		**5**	**100,00**

Sumber : Data Kepegawaian DPRKPKP Kota Tanjungpinang 2017

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Informan yang peneliti gunakan sebanyak 5 orang yang diantara adalah 4 laki-laki atau 60 % dan Informan perempuan sebanyak 1 orang atau 40 %. Hal tersebut dilakukan karena tenaga dalam evaluasi sistem pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang laki-laki dan perempuan dengan tugas yang tidak sama dan lokasinya berbeda.

Tabel III. 2
Karakteristik Informan Berdasarkan
Umur

No.	Umur	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Kurang dari 30 tahun	-	-
2	30 - 35 tahun	-	-
3	36 - 40 tahun	5	100
4	41 - 45 tahun	-	-
5	46 - 50 tahun	-	-
6	Lebih dari 50 tahun	-	-
Jumlah		**5**	**100,00**

Sumber : Data Kepegawaian DPRKPKP Kota Tanjungpinang 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Informan yang berusia kurang dari 36 - 40 tahun, yaitu sebanyak 5 orang atau 100% Kondisi umur Informan yang demikian menunjukkan bahwa Informan berada pada tingkat usia rata-rata yang produktif yaitu dengan kategori 36 tahun ke atas dan masih memiliki posisi sebagai implementor dalam sistem pengelolaan persampahan

Tabel III. 3
Karakteristik Informan Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Informan (Orang)	Persentase (%)
1.	SD	1	10,00
2.	SLTP	1	10,00
3.	SLTA	2	70,00
4.	S1	1	10,00
5	S2	-	-
Jumlah		**5**	**100,00**

Sumber : Data Kepegawaian DPRKPKP Kota Tanjungpinang 2017

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar Informan memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1 orang atau 10%, tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 1 Orang atau 10%, tingkat pendidikan untuk tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 2 orang atau 70%, sedangkan untuk tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 1 orang atau 10% Hal ini dapat mempengaruhi Informan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai implementor dalam sistem pengelolaan persampahan.

Tabel III. 4
Karakteristik Informan Berdasarkan
Masa Kerja

No.	Masa Kerja (Tahun)	Informan (Orang)	Persentase (%)
1	1 – 5	4	90,00
2	6 – 10	1	10,00
3	11 – 15	-	-
4	Lebih dari 15	-	-
Jumlah		**5**	**100,00**

Sumber : Data Kepegawaian DPRKPKP Kota Tanjungpinang 2017

Berdasarkan Tabel IV.16 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah Informan yang memiliki masa kerja 1-5 tahun berjumlah 4 orang atau 90%, Informan dengan masa kerja 6-10 tahun berjumlah 1 orang atau 10%. Dari uraian tersebut berarti segi pengalaman kerja yang dimiliki maka kebanyakan Informan memiliki masa kerja 1-5 tahun.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yakni berupa pertanyaan yang digunakan untuk mengobservasi mengenai evaluasi sisstem pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini prosedur pengumpulandata yang akan dilakukan oleh peneliti pada kali ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan proses psikologis diantaranya yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan yaitu observasi berperanserta (participant observation) dan

peneliti tergolong kedalam partisipasi pasif dengan menggunakan alat pengumpul data dalam observasi yaitu daftar *check list* dan catatan harian. Adapun yang ingin diobservasi adalah hal - hal yang berkaitan dengan Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan di Kota Tanjungpinang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang.

2. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in depth interview). Dalam wawancara mendalam ini dimana pengamat dan informan bertatap muka langsung di dalam wawancara yang dilakukan. Peneliti mengharapkan perolehan informasi dari informan mengenai suatu masalah yang ditelitinya, yang tidak dapat terungkap melalui penggunaan pedoman wawancara. Oleh karena itu maka di dalam pelaksanaan wawancara mendalam, pertanyaan-pertanyaan yang akan dikemukakan kepada informan tidak dapat dirumuskan secara pasti sebelumnya, melainkan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan banyak bergantung dari kemampuan dan pengalaman peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan sesuai dengan jawaban informan. dan juga informan kunci (*key informan*). Berkenaan mengenai variabel Evaluasi Kebijakan. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara. Adapun topik pembahasan wawancara yang akan dilaksanakan terhadap informan dan informan kunci adalah Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan di Kota Tanjungpinang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang.

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data Primer dan data Sekunder Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data Primer dan data Sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari informan yang menjadi sampel sebagai data untuk menganalisa penelitian dan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara seluruh informan yang meliputi data tentang adalah Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan di Kota Tanjungpinang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang.

b. Data Sekunder

Data Skunder merupakan data pendukung yang melengkapi data primer, yang diperoleh melalui dokumen - dokumen atau laporan tertulis yang berhubungan dengan adalah Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan di Kota Tanjungpinang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, seperti jumlah pegawai, fasilitas kerja, monografi lokasi penelitian dan lain-lain.

F. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data sebagai berikut :

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Data yang diperoleh di dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Analisis data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

c. Conclusion drawing/verification

Dari data yang diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada awalnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan dibentuk sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang yang mempunyai urusan dalam pengelolaan persampahan pada tahun 2005 yang berlokasi di Jalan Merdeka No.5 Tanjungpinang, kemudian sekitar tahun 2006-2007 melaui Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dilebur ke Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Tanjungpinang menjadi Bidang Kebersihan dan Pertamanan, dan pada tahun 2008-2012 dipisah kembali menjadi Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman.

Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang dibentuk Berdasarkan Keputusan Walikota nomor : 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang. Yang mempunyai tugas utama dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kebersihan dan keindahan kota, dan kemudian pada tahun 2013 terbentuk Dinas Tata Kota Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman melaui Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 58 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang, dan pada tahun 2015 Dinas Tata Kota Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman dipisah kembali menjadi Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang pada Tahun 2015.

Dan yang terakhir melalui Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No.11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang

1. **Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang**

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang mempunyai sumber daya manusia yang cukup baik yang dapat dilihat dari data kepegawaian. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang mempunyai Jumlah pegawai sebanyak 109 (seratus sembilan) orang. Berdasarkan data jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang pada tahun 2017 yang paling dominan adalah pegawai dengan tingkat pendidikan SMA berjumlah 73 orang sedangkan komposisi pegawai menurut tingkat kepangkatan yang paling banyak adalah golongan II sebesar 24 orang. Hal ini merupakan potensi sumber daya manusia bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan Dan Pertamanan Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis. Data kepegawaian dimaksud sebagai berikut:

Tabel IV.1
Jumlah Pegawai/Honorer berdasarkan status Kepegawaian di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang Tahun 2017

No	Sekretariat/Bidang	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	PTT	Honorer Outsourching	
1	Sekretariat	12	8	7	27
2	Bidang Pertamanan, Pemakaman dan PJU	20	8	11	39

3	Bidang Perkim dan Kebersihan	12	5	11	28
4	Bidang Sarana dan Prasarana	7	2	6	15
Jumlah		**51**	**23**	**35**	**109**

Sumber: Data Kepegawaian DPRKPKP Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tabel diatas bahwa jumlah kepegawaian yang paling banyak di Bidang Pertamanan, Pemakaman dan PJU yaitu berjumlah 39 Orang sementara dalam hal ini Bidang Perkim dan Kebersihan berjumlah 29 Orang. Dengan demikian jumlah pegawai yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang masih minim dalam pengelolaan persampahan dimana didalam penelitian ini akan melihat sistem pengelolaan persampahan sejauh mana pengelolaan dengan melihat kondisi kepegawaian yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang.

Tabel IV.2
Jumlah Pegawai/Honorer menurut Jenis Kelamin di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang Tahun 2017

No	Sekretariat/Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	Sekretariat	19	8	27
2	Bidang Pertamanan, Pemakaman dan PJU	27	12	39
3	Bidang Perkim dan Kebersihan	24	4	28
4	Bidang Sarana dan Prasarana	9	6	15
Jumlah		**79**	**30**	**109**

Sumber: Data Kepegawaian DPRKPKP Tahun 2017

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat dari Jenis Kelamin disini lebih banyak memiliki pegawai laki – laki dibanding perempuan dimana di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang memang memerlukan banyak laki – laki dibanding perempuan

untuk melaksanakan tugas lapangan sangat diperlukan tenaga Laki – laki dibanding dengan perempuan.

Tabel IV.3
Jumlah Pegawai/Honorer Menurut Tingkat Pendidikan Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang
Tahun 2017

No	Sekretariat/Bidang	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Sekretariat	1	9	2	14	-	1	27
2	Bidang Pertamanan, Pemakaman dan PJU	-	9	1	27	2	-	39
3	Bidang Perkim dan Kebersihan	2	3	-	23	-	-	28
4	Bidang Sarana dan Prasarana	-	6	-	9	-	-	15
Jumlah		**3**	**27**	**3**	**73**	**2**	**1**	**109**

Sumber: Data Kepegawaian DPRKPKP Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat status kepegawaian dalam jenjang pendidikan dapat dilihat bahwa pegawai yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Perumahan Rakyat, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang memiliki pegawai yang dominan banyak masih berada tingkat pendidikan SLTA baik dalam status Pegawai maupun honorer. Dengan dimikian banyak yang berstatus SLTA agar memaksimalkan pekerjaan pada saat berada di lapangan.

Tabel IV.4
Jumlah Pegawai/Honorer Menurut Umur Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang
Tahun 2017

No	Sekretariat/Bidang	Umur (Tahun)						Jumlah
		< 30	30 – 35	36 – 40	41-45	46 – 50	> 50	
1	Sekretariat	8	5	6	3	3	2	27
2	Bidang Pertamanan, Pemakaman dan PJU	10	8	4	10	5	2	39

3	Bidang Perkim dan Kebersihan	9	6	3	1	4	5	28
4	Bidang Sarana dan Prasarana	4	1	5	2	1	2	15
Jumlah		**31**	**20**	**18**	**16**	**13**	**11**	**109**

Sumber: Data Kepegawaian DPRKPKP Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pegawai atau honorer yang berada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang memiliki usia hampir banyak di bawah umur 30 tahun kebawah dimana para pegawai serta honorer memiliki usia produktif kerja. Serta usia yang paling minim yaitu usia diatas 50 Tahun.

Tabel IV.5
Jumlah Pegawai/Honorer Menurut Masa Kerja Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2017

No	Sekretariat/Bidang	Masa Kerja (Tahun)				Jumlah
		1-5	6-10	11-15	>15	
1	Sekretariat	9	11	5	2	27
2	Bidang Pertamanan, Pemakaman dan PJU	20	15	3	1	39
3	Bidang Perkim dan Kebersihan	17	4	3	4	28
4	Bidang Sarana dan Prasarana	7	3	4	1	15
Jumlah		**53**	**33**	**15**	8	**109**

Sumber: Data Kepegawaian DPRKPKP Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pegawai dan honorer yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang yang paling dominan memiliki masa kerja 1 – 5 Tahun sedangkan yang paling sedikit lebih dari 15 tahun. Dimana dengan adanya kebijakan yang baru banyak memiliki kebijakan dengan sendirinya sehingga banyak pegawai serta honorer yang bekerja 1-5 tahun.

Tabel IV.6
Jumlah Pegawai/Honorer Menurut Golongan Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2017

No	Sekretariat/Bidang	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	Non Pns	
1	Sekretariat	1	5	6	-	15	27
2	Bidang Pertamanan, Pemakaman dan PJU	-	8	10	2	19	39
3	Bidang Perkim dan Kebersihan	-	5	6	1	16	28
4	Bidang Sarana dan Prasarana	-	4	2	1	8	15
Jumlah		**1**	**22**	**24**	4	**58**	**109**

Sumber: Data Kepegawaian DPRKPKP Tahun 2017

Dapat dilihat pada tabel pegawai / honorer menurut golongan yang paling dominan banyak di Golongan II, dan serta Non PNS. Dimana Non PNS ini lah yang menunjang pekerjaan di lapangan, agar dapat dilaksanakan pekerjaan di lapangan serta menunjang pekerjaan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang baik dalam segi pengelolaan kebersihan , pertamanan, pemakaman dan sebagainya.

B. Hasil

Dengan menerapkan teori Dunn, peneliti bermaksud menjabarkan bagaimana desain penelitian ini agar terdapat batasan masalah dan tidak terjadi kesalahpahaman antara variabel, dengan menggunakan konsep dari dunn peneliti menganggap teori dunn ini yang tepat digunakan peneliti kali ini dengan adanya fenomena , Efektivitas yang mana maksud dari efektivitas menurut dunn merupakan Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai, untuk menjawab hasil pertanyaan dunn tersebut menerapkan indikator untuk mengetahui jawaban tersebut adalah Tercapainya Tujuan maksud tercapainya tujuan tersebut akan

mengetahui sistem Pengelolaan Persampahan yang terealisasi dengan baik. Dengan mengetahui indikator dalam penelitian peneliti akan mengetahui efektif atau tidaknya dengan mengukur indikator dari tercapainya tujuan. Indikator yang kedua untuk mengetahui efektifitas menurut Dunn adalah Kejelasan Sasaran dengan menemukan terdapat Kesesuaian antara Konsep Kebijakan dan Hasil. Dengan diketahui kesusuaian antara konsep kebijakan dan hasil ini lah dapat dilihat bahwa sistem pengelolaan persampahan efektif atau tidaknya berdasarkan teori dunn tersebut.

1. **Efektivitas,** Suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah, biasanya dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Seringkali tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut tidak sesuai yang diharapkan karena faktor lain yang tidak terduga seperti perubahan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut. Salah satu kriteria dasar dalam menilai suatu program atau kebijakan adalah dengan efektivitas.
   a. Tercapainya Tujuan, Sistem pengelolaan persampahan harus dilaksanakan guna menciptakan pengelolaan persampahan yang terealisasi dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 Informan masing-masing Informan memiliki tanggapan yang hampir sama mengenai system pengelolaan persampahan yang terealisasi dengan baik.

      Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh salah satu Kasi kebersihan Kota dengan inisial OP mengenai sistem pengelolaan persampahan yang terealisasi dengan baik sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

> "Menurut saya pengelolaan sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang sudah dilaksanakan dengan baik dengan pengangkutan yang dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan" (*Wawancara Tanggal 25 Juli 2017*)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah satu pengawas kebersihan dengan inisial AR berkenaan dengan sistem pengelolaan persampahan yang terealisasi dengan baik maka diperoleh hasilnya sebagai berikut :

> "Saya rasa sistem pengelolaan persampahan yang ada selama ini sudah cukup baik meskipun ada kekurangan dilihat dari prosesnya sudah dapat dikatakan sudah baik karena waktu pengelolaan diatur tepat dengan kapan sampah itu akan muncul di tempat pembuangan sampah sehingga menurut saya itu bisa dikatakan pengelolaan sampahnya teratur meskipun ada hambatan ketika dalam pengelolaan persampahan" (*Wawancara Tanggal 25 Juni 2017*)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh salah satu petugas sapu dengan inisial SD mengenai sistem pengelolaan persampahan yang terealisasi dengan baik sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

> "Soal mengenai pengelolaan sampah sistemnya bagaimana saya kurang mengerti karena saya disini sebagai petugas lapangan yang mengelola kebersihan, sedangkan saya hanya mengikuti apa yang telah menjadi tugas saya, kalau berdasarkan saya kerja saya melakukannya dengan baik pada saat bekerja sehingga sampah yang ada saya bersihkan pada saat saya bekerja" (*Wawancara Tanggal 25 Juli 2017*)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh petugas kebersihan dengan inisial MR mengenai sistem pengelolaan persampahan yang terealisasi dengan baik sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

> "Mohon maaf sebelumnya bang saya kurang mengetahui juga terhadap system pengelolaan yang baik itu seperti apa yang jelas system pengelolaan sampah yang ada di Kota Tanjungpinang ini menurut saya sudah baik karena apa dikatakan baik bahwa sampah yang telah terangkut dan dibuang di TPA tidak hanya menjadi tumpukan sampah tetapi diolah lagi sehingga nanti menjadi sesuatu yang berguna, dengan demikan dapat saya katakan bahwa system pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang ini dapat dikatakan cukup baik". (*Wawancara Tanggal 25 Juli 2017*)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah satu petugas pengawas dengan inisial A.M berkenaan dengan sistem pengelolaan persampahan yang terealisasi dengan baik maka diperoleh hasilnya sebagai berikut :

> "Menurut pandangan saya tentang system pengelolaan persampahan pengelolaan di Kota Tanjungpinang ini dapat dikatakan baik dan cukup maksimal dikarenakan pedulinya atasan yang mengawasi para petugas terhadap kebersihan yang ada di Kota Tanjungpinang dengan adanya hal tersebut maka pengelolaan persampahan dapat berjalan dan para petugaspun menjadi disiplin sehingga pengelolaan persampahan dapat maksimal dengan disiplinnya dari para petugas, dengan demikian menurut pendapat saya system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini sudah baik meskipun ada beberapa kendala". (*Wawancara Tanggal 25 Juli 2017*)

Selanjutnya melihat tanggapan informan yang berasal dari masyarakat dengan inisial M.I didapati hasilnya sebagai berikut:

> "Menurut pandangan saya selaku sebagai warga masyarakat melihat sistem pengelolaan sampah ini sudah belum terealisasi dengan baik dikarenakan masih ada persampahan yang tercecer dijalan maupu di komplek perumahan" (*Wawancara Tanggal 23 Januari 2018*)

Berikut ini juga merupakan tanggapan dari masyarakat dengan inisial A.B.P sehingga didapati hasilnya sebagai berikut:

> "Sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini dapat dikatakan belum dapat terealisasi dengan baik dikarenakan sarana yang kurang sehingga ada salah satu lori

> yang sebenarnya sudah tidak layak dipakai tetapi masih tetap dipakai sehingga sampah yang terangkut berterbaran dan mengakibatkan sampah tercecer di tepi jalan." (*Wawancara Tanggal 24 Januari 2018*)

Disamping itu dilakukan wawancara dengan *key informan* (Kabid. Perkim dan Kebersihan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Petamanan Kota Tanjungpinang) dengan inisial Bpk. WB dan didapati hasilnya sebagai berikut:

> "Berbicara mengenai system pengelolaan persampahan yang telah terealisasi dengan baik, di Kota Tanjungpinang ini merupakan wilayah yang menangani pengelolaan persampahan yang baik, jika dibandingkan Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang lainnya dengan adanya proses yang akan mengolah tumpukan sampah yang ada di TPA dan dalam sektor lainnya. Tetapi jika dibandingkan dengan wilayah Provinsi lainnya masih mengalami kekurangan baik itu dari dalam hal budaya masyarakatnya maupun cara pengelolaan persampahan itu sendiri". (*Wawancara Tanggal 25 Juli 2017*)

b. Kejelasan Sasaran, system pengelolaan persampahan dalam hal ini yang mana terdapat kesesuaian antara system pengelolaan dengan hasil yang ingin dicapai.

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh salah satu Kasi kebersihan Kota dengan inisial OP mengenai kesesuaian antara system pengelolaan dengan hasil yang ingin dicapai sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

> "Menurut saya system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini diupayakan agar mencapai dan sesuai apa yang dinginkan Kepala Daerah yang dicantumkan dalam visi dan misi kepala daerah yaitu menciptakan Tanjungpinang yang bersih, sehingga diupayakan seoptimal mungkin agar system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang dapat memenuhi hasil yang dinginkan" (*Wawancara Tanggal 26 Juli 2017*)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah satu pengawas kebersihan dengan inisial AR berkenaan dengan kesesuaian antara sistem pengelolaan dengan hasil yang ingin dicapai maka diperoleh hasilnya sebagai berikut :

> "Saya rasa ingin adanya hasil yang maksimal dengan system pengelolaan persampahan tentu harus mengadakan pengawasan terhadap sistem pengelolaan persampahan tersebut dengan adanya pengawasan yang ada akan menciptakan kesesuaian dan hasil yang akan dicapai". (*Wawancara Tanggal 26 Juli 2017*)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh salah satu petugas sapu dengan inisial SD mengenai kesesuaian antara system pengelolaan dengan hasil yang ingin dicapai sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

> "Menurut saya pak Pemerintah ini menginginkan Kota Tanjungpinang yang bersih maka dari itu menciptakan system pengelolaan persampahan dengan menggaji para petugas kebersihan guna mencapai hasil yang ingin dicapai, dengan adanya para pengawas yang mengawasi petugas kebersihan , dengan itu kami bekerja dengan giat, hal ini akan menimbulkan kesesuaian dengan hasil yang ingin dicapai nantinya yaitu Kota yang bersih" (*Wawancara Tanggal 26 Juli 2017*)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh petugas kebersihan dengan inisial MR mengenai kesesuaian antara system pengelolaan dengan hasil yang ingin dicapai sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

> "Mengenai kesesuaian sistem pengelolaan persampahan dengan hasil yang dicapai saya kurang memahami pak, tetapi pendapat saya dengan adanya system pengelolaan persampahan ini Kota Tanjungpinang menjadi bersih dengan demikian menciptakan system pengelolaan persampahan guna untuk mencapai hasil menciptakan lingkungan yang bersih, maka dari itu dapat dikatakan sesuai dengan hasil yang diharapkan. (*Wawancara Tanggal 26 Juli 2017*)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah satu petugas pengawas dengan inisial A.M mengenai kesesuaian antara system pengelolaan dengan hasil yang ingin dicapai sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

> "Menurut saya system pengelolaan ini sesuai dengan hasil yang ingin dicapai untuk menciptakan kota yang bersih karenakan menyediakan sarana dan prasana guna menciptakan pengelolaan persampahan itu sendiri agar dapat menunjang system pengelolaan persampahan". (*Wawancara Tanggal 26 Juli 2017*)

Selanjutnya melihat tanggapan informan yang berasal dari masyarakat dengan inisial M.I didapati hasilnya sebagai berikut:

> "Menurut saya kesesuaian kebijakan yang dibuat dan hasil yang diperoleh dari sistem pengelolaan persampahan ini telah sesuai dengan adanya sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini menciptakan pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang dan alhasil menciptakan Kota Tanjungpinang yang bersih" (*Wawancara Tanggal 23 Januari 2018*)

Berikut melihat tanggapan informan yang berasal dari masyarakat dengan inisial A.B.P didapati hasilnya sebagai berikut:

> "Kesusuaian Kebijakan dengan hasil yang ingin dicapai Kota Tanjungpinang dengan menerapkan sistem pengelolaan persampahan sudah mengalami peningkatan sampah sehingga dengan demikian Tanjungpinang akan dapat dikatakan bersih. (*Wawancara Tanggal 24 Januari 2018*)

Disamping itu dilakukan wawancara dengan *key informan* (Kabid. Perkim dan Kebersihan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Petamanan Kota Tanjungpinang) dengan inisial Bpk. WB dan didapati hasilnya sebagai berikut:

> "Mengenai kesesuaian system pengelolaan persampahan antara hasil yang akan dicapai sejauh ini hanya sebatas bahwa jika menciptakan system pengelolaan persampahan akan menciptakan

> lingkungan yang bersih itu sesuai dengan apa yang diharapakan, tetapi nyatanya bahwa system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini masih memiliki kekurangan sehingga di TPA masih ada tumpukan-tumpukan sampah berbeda dengan daerah yang lain yang justru hampir tidak ada lagi tumpukan sampah, sampah tersebut dijadikan bahan – bahan yang berguna". (*Wawancara Tanggal 26 Juli 2017*)

2. **Efisiensi,** merupakan kriteria dalam menentukan seberapa besar input yang digunakan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Efisiensi artinya melaksanakan dan menghasilkan segala sesuatu dengan tepat, serta efisien juga merupakan perbandingan antara sumber – sumber yang digunakan dengan output yang dihasilkan. Selanjutnya Dunn mengemukakan indikator evaluasi adalah efisiensi merupakan Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan itu dunn menggunakan indikator untuk mengukur efisiensi yaitu Waktu Pelaksanaan dengan mengetahui Pengelolaan Persampahan oleh DPRKPKP Lebih Susuai dan Tepat, dengan diketahuinya nantinya pengelolaan persampahan yang lebih sesuai dan tepat seperti apa dan hasil tersebut lah kita mengetahui bahwa system pengelolaan persampahan itu efisien atau tidak. Selanjutnya selain efisiensi Dunn juga mengemukaan bahwa indikator untuk mengukur evaluasi adalah Kecukupan yang mana kecukupan merupakan Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah, dengan ingin diketahuinya pencapaian hasil yang diinginkan dunn mengemukakan bahwa harus mengetahui kepuasan terhadap hasil dimana yang akan di teliti oleh peneliti adalah Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Dapat terlaksana sesuai sasaran, dengan hal ini akan terjawab nantinya bagaimana kecukupan yang dimaksudkan dunn tersebut.

a. Waktu Pelaksanaan, merupakan sesuatu tolak ukur dalam mengevaluasi dalam sistem pengelolaan Persampahan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang lebih sesuai dan tepat.

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh salah satu Kasi kebersihan Kota dengan inisial OP mengenai system pengelolaan persampahan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang lebih sesuai dan tepat sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

> "Menurut saya waktu pelaksanaan yang dilakukan dalam system pengelolaan persampahan ini para petugas di kerahkan untuk bekerja semaksimal mungkin dalam satu hari yaitu 2 shiff untuk petugas sapu jalan begitu juga lori sampah" (*Wawancara Tanggal 28 Juni 2017*)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah satu pengawas kebersihan dengan inisial AR mengenai system pengelolaan persampahan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang lebih sesuai dan tepat sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

> "Menurut pendapat saya waktu pelaksaan diataur agar dapat menciptakan kesesuaian dimana pada pagi hari mulai pukul 06.00 sampai pukul 10.00 dan pada siang hari pukul 02.00 sampai pukul 04.00. diwaktu inilah banyak ditemukan sampah sehingga dinas terkait menetapkan waktu tersebut. (*Wawancara Tanggal 28 Juli 2017*)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh salah satu petugas sapu dengan inisial E.S mengenai system pengelolaan persampahan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,

Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang lebih sesuai dan tepat sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

> "Menurut saya pak waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan dari dinas ini sudah sesuai dan lumayan lama sehingga dengan lokasi yang cukup luas agar dapat memaksimal kan pekerjaan kami pak" (*Wawancara Tanggal 28 Juli 2017*)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh petugas kebersihan dengan inisial R.E mengenai system pengelolaan persampahan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang lebih sesuai dan tepat sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

> "Saya rasa waktu pelaksanaan ini bergantung cuaca kadang ketika hujan maka dengan itu juga akan mngakibatkan keterlambatan bekerja dan akibatnya sampah makin berkumpul dan pengelolaan pun terlambat" (*Wawancara Tanggal 28 Juli 2017*)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah satu petugas pengawas dengan inisial EN mengenai system pengelolaan persampahan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang lebih sesuai dan tepat sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

> "Waktu pelaksanaan sudah sesuai dengan jumlah terkumpulnya sampah dengan demikian sangat memudahkan untuk melaksanakan pengelolaan persampahan tergantung hambatan yang tidak terduga aja lagi pak seperti cuaca, maupun kesehatan yang nanti nya mengakibatkan kurang efektif melakasanakan pengelolaan persampahan". (*Wawancara Tanggal 28 Juli 2017*)

Selanjutnya melihat tanggapan informan yang berasal dari masyarakat dengan inisial M.I didapati hasilnya sebagai berikut:

> "Berbicara masalah waktu pelaksanaan yang dilakukan dari dinas terkait untuk melaksanakan sistem pengelolaan persampahan yang

> ada di Kota Tanjungpinang sudah cukup maksimal dengan waktu banyak nya masyarakat yang membuang pada saat itu sehingga tidak ada yang sampah yang tidak masuk dalam jadwal pengangkutan" (*Wawancara Tanggal 24 Januari 2018*)

Selanjutnya melihat tanggapan informan yang berasal dari masyarakat dengan inisial A.B.P didapati hasilnya sebagai berikut:

> "Dapat dikatakan waktu pelaksanaan sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang masih belum maksimal terkadang masih ada saja sampah yang tidak terangkut" (*Wawancara Tanggal 24 Januari 2018*)

Disamping itu dilakukan wawancara dengan *key informan* (Kabid. Perkim dan Kebersihan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Petamanan Kota Tanjungpinang) Bpk. WB dan didapati hasilnya sebagai berikut:

> "Waktu pelaksanaan system pengelolaan persampahan sudah ditetapkan dengan sedemikian rupa agar dapat menetralisir sampah yang bertumpuk agar dapat memaksimalkan proses system pengelolaan persampahan meskipun demikian tidak menutup kemungkinan hambatan yang mendatang di kemudian harinya" (*Wawancara Tanggal 28 Juli 2017*)

3. **Kecukupan,** Kecukupan dalam hal ini yakni system pengelolaan persampahan dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan *(adequacy)* berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternative yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

a. Kepuasan Terhadap Hasil, merupakan indikator yang akan dievaluasi dengan memperhatikan sistem pengelolaan persampahan yang dapat terlaksana dengan baik.

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh salah satu Kasi kebersihan Kota dengan inisial OP mengenai sistem pengelolaan persampahan yang dapat terlaksana dengan baik. sehingga didapati hasilnya sebagai berikut:

> "Menurut saya system pengelolaan persampahan ini masih belum memenuhi kriteria yang baik dari wilayah lain yang memiliki system yang lebih baik lagi dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang masih kurang dengan adanya wilayah Kota Tanjungpinang yang seluas ini akan memerlukan petugas yang lebih banyak lagi dan pengawas lapangan yang banyak juga agar petugas yang ada mudah diawasi sehingga pekerjaan dapat terarah" (*Wawancara Tanggal 31 Juli 2017*)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah satu pengawas kebersihan dengan inisial AG berkenaan dengan sistem pengelolaan persampahan yang dapat terlaksana dengan baik. maka diperoleh hasilnya sebagai berikut :

> "Saya mengganggap system pengelolaan Tanjungpinang ini masih belum maksimal dan saya pribadipun kewalahan untuk mengawasi pengelolaan persampahan khususnya yang saya awasi petugas yang cukup banyak sehingga kadangkala masih menyisakan sampah pada saat mereka bekerja. (*Wawancara Tanggal 31 Juli 2017*)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh salah satu pegawai di TPA dengan inisial SS mengenai sistem pengelolaan persampahan yang dapat terlaksana dengan baik. sehingga didapati hasilnya sebagai berikut:

> "Saya merasa masih kurang dengan sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini dijalan-jalan masih ada sampah yang tersisa bahkan di TPA pun masih terlihat kurang rapi dan menjadi sampah timbunan yang sudah menggunung" (*Wawancara Tanggal 31 Juli 2017*)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh petugas kebersihan dengan inisial MR mengenai sistem pengelolaan persampahan yang dapat terlaksana dengan baik. sehingga didapati hasilnya sebagai berikut:

> "Sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini masih kurang maksimal, meskipun saya sebagai petugas kebersihan saya memandang bahwa sampah yang setiap hari terkumpul dan dibuang di TPA hanya menimbulkan tumpukkan sampah yang tidak bisa diolah lagi dan lama-kelamaan penuh TPA itu pak" (*Wawancara Tanggal 31 Juli 2017*)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah satu petugas pengawas dengan inisial A.M mengenai sistem pengelolaan persampahan yang dapat terlaksana dengan baik. sehingga didapati hasilnya sebagai berikut:

> "Sistem pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang masih kurang maksimal karena sampah itu hanya dibuang meskipun ada sebagian yang bisa dijadikan kompos, tapi dengan sisanya terbuang percuma tidak menghasilkan apa-apa" (*Wawancara Tanggal 31 Juli 2017*)

Selanjutnya melihat tanggapan informan yang berasal dari masyarakat dengan inisial A.B.P didapati hasilnya sebagai berikut:

> "Saya sebagai masyarakat masih belum sangat puas dengan adanya sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini dikarenakan sampah yang ada tidak bisa dijadikan bahan berguna lagi seperti daerah-daerah luar yang sampah nya dapat dijadikan barang yang berguna" (*Wawancara Tanggal 31 Juli 2017*)

Selanjutnya melihat tanggapan informan yang berasal dari masyarakat dengan inisial M.I didapati hasilnya sebagai berikut:

> "Menurut saya sistem pengelolaan persampahan yang terjadi sekarang masih belum memuaskan saya selaku masyarakat yang merasakan sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang masih memiliki kekurangan dengan adanya sampah masih berserakan dan tidak terangkut saya pu kurang tau memang tidak terangkut atau sengaja tidak angkut". (*Wawancara Tanggal 31 Juli 2017*)

Disamping itu dilakukan wawancara dengan *key informan* (Kabid. Perkim dan Kebersihan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Petamanan Kota Tanjungpinang) inisial Bpk. WB dan didapati hasilnya sebagai berikut:

> "Sistem pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang ini masih kurang maksimal dikarenakan budaya masyarakat juga yang masih membuang sampah sembarangan serta sarana prasarana masih kurang memadai untuk dapat memproses sampah itu sendiri agar dapat digunakan untuk masyarakat juga nantinya" (*Wawancara Tanggal 31 Juli 2017*)

4. **Pemerataan,** dalam system pengelolaan sampah dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan. Kriteria kesamaan *(equity)* erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok – kelompok yang berbeda dalam masyarakat, berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan dengan tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat yang merata. Pemerataan yang dikemukakan oleh dunn merupakan Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda untuk mengetahui pemerataan

diperlukan indikator untuk mengetahui pemerataan yang di laksanakan dalam system pengelolaan persampahan dimana indikator tersebut adalah Tidak Mementingkan Kelompok Tertentu. Dengan demikian tidak mementingkan kelompok tertentu kita harus mengetahui bagaimana Sistem Pengelolaan Persampahan yang dapat dijalankan secara menyeluruh. Pada akhir nya nanti peneliti akan mengetahui pemerataan dalam konsep teori dunn tersebut.

a. Tidak Mementingkan Kelompok Tertentu, dalam hal ini untuk mengetahui apakah sistem pengelolaan persampahan yang dapat dijalankan secara menyeluruh.

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh salah satu Kasi kebersihan Kota dengan inisial OP mengenai sistem pengelolaan persampahan yang dapat dijalankan secara menyeluruh. sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

> "Menurut saya setiap petugas tidak ada membedakan antara satu sama lainnya dan semua petugas rata pembagian pekerjaannya dengan demikian dapat dikatakan bahwa system pengelolaan sampah dapat dikatakan sudah hampir secara menyeluruh meskipun ada beberapa lokasi yang memang tidak ada petugas kebersihannya" (*Wawancara Tanggal 1 Agustus 2017*)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah satu pengawas kebersihan dengan inisial AR berkenaan dengan sistem pengelolaan persampahan yang dapat dijalankan secara menyeluruh, maka diperoleh hasilnya sebagai berikut:

> "Saya rasa masih belum menyeluruh system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang, kenapa demikian ketika ingin pergi mengawas petugas masih ada lokasi – lokasi

tertentu yang masih belum tertangani pengelolaan persampahan" (*Wawancara Tanggal 1 Agustus 2017*)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh salah satu petugas sapu dengan inisial SI mengenai sistem pengelolaan persampahan yang dapat dijalankan secara menyeluruh. sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

"Menurut saya system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini masih belum menyeluruh mengapa demikian para petugas ini dikerahkan hanya di Jalan-Jalan Kota dan tempat pembuangan sampah sepertin perumahan tidak lerlayani". (*Wawancara Tanggal 1 Agustus 2017*)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh petugas kebersihan dengan inisial RE mengenai sistem pengelolaan persampahan yang dapat dijalankan secara menyeluruh. sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

"Kalau berdasarkan pekerjaan yang kami kerjakan antara satu yang lainnya itu tidak dibedakan baik berdasarkan lokasi maupun gaji namun system pengelolaan ini kurang menyeluruh dikarenakan di daerah perumahan memang belum disediakan petugas kebersihan" (*Wawancara Tanggal 1 Agustus 2017*)

Dengan demikian ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh A.M mengenai sistem pengelolaan persampahan yang dapat dijalankan secara menyeluruh. sehingga didapati hasilnya sebagai berikut:

"Sistem pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang ini sejauh yang saya ketahui belum dapat dikatakan merata dan menyeluruh dikarenakan selama ini hanya sebatas jalan perkotaan serta tempat pembuangan sampah yang hanya dilayani system pengelolaan persampahan ini" (*Wawancara Tanggal 1 Agustus 2017*)

Selanjutnya melihat tanggapan informan yang berasal dari masyarakat dengan inisial M.I didapati hasilnya sebagai berikut:

> "Sistem pengelelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang pada hakikatnya memang tidak mementingkan kelompok tertentu dimana sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini dilakukan secara merata mengangkut sampah di sepanjang jalan." (*Wawancara Tanggal 1 Agustus 2017*).

Selanjutnya melihat tanggapan informan yang berasal dari masyarakat dengan inisial A.B.R didapati hasilnya sebagai berikut:

> "Sistem pengelolaan persampahan tidak melihat sampah dari segi manapun pengangkutan yang dilakukan oleh orang Dinas dilakukan merata tidak mementingkan siapa dan sampah siapa" (*Wawancara Tanggal 1 Agustus 2017*).

Disamping itu dilakukan wawancara dengan *key informan* Bpk. WB (Kabid. Perkim dan Kebersihan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Petamanan Kota Tanjungpinang) dan didapati hasilnya sebagai berikut:

> "Sistem pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang ini masih belum menyeluruh atau merata mengapa pengelolaan persampahan belum menyeluruh dikarenakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dari bidang ini hanya pengelolaan persampahan jalan protokol, arteri, Tempat pembuangan sementara (TPS), sampah drainase dan tempat-tempat umum, oleh karena diluar ini memang tidak terlayani pengelolaan persampahan." (*Wawancara Tanggal 1 Agustus 2017*)

5. **Responsivitas,** Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu, kriteria

responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan. Responsivitas dalam indikator evaluasi menurut dunn merupakan Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Untuk mengetahui responsivitas yang dimaksud dunn ini perlunya Keikutsertaan dan partisipasi dimana peneliti ingin meneliti Lemahnya penerapan dan pelaksanaan sistem pengelolaan persampahan

a. Keikutsertaan dan Partisipasi, maksud dari ini inguin mengetahui bagaimana lemahnya penerapan dan pelaksanaan sistem pengelolaan persampahan.

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh salah satu Kasi kebersihan Kota dengan inisial OP mengenai lemahnya penerapan dan pelaksanaan sistem pengelolaan persampahan. sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

> "Penerapan system pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang memang masih lemah dikarena kan fasilitas kurang memadai penerapan system pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang hanya sebatas kumpul angkut buang, dengan penerapan yang demikian pelaksanaan yang ada juga masih elum maksimal dengan penerapan system yang ada dan begitu juga pelaksaannya" (*Wawancara Tanggal 2 Agustus 2017*)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah satu pengawas kebersihan dengan inisial AG mengenai lemahnya penerapan dan pelaksanaan sistem pengelolaan persampahan. sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

> "Penerapan system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang masih hanya biasa – biasa saja masih sebatas pembersihan serta pengangkutan belum terjadinya pengolahan , sehingga masih lemahnya penerapan tersebut maka dari itu pelaksanaan system pengelolaan persampahan masih hanya sebatas penerapan" (*Wawancara Tanggal 2 Agustus 2017*)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh salah satu petugas sapu dengan inisial SD mengenai lemahnya penerapan dan pelaksanaan sistem pengelolaan persampahan. sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

> "Menurut saya pak selama saya bekerja penerapan system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini saya belum nampak bahwa penerapan yang bagus hanya sebatas membayar orang untuk melakukan pembersihan dan pengangkutan tetapi tidak adanya pengolahan dari hasil sampah itu sendiri sehingga pelaksanaan yang ada pada saat ini hanya biasa – biasa saja" (*Wawancara Tanggal 2 Agustus 2017*)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh petugas kebersihan dengan inisial MR mengenai lemahnya penerapan dan pelaksanaan sistem pengelolaan persampahan. sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

> "Penerapan system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini masih lemah dengan adanya pembuang dan pengakutan tidak menutup kemungkinan bahwa tidak adanya sampah lagi tetapi masih juga ada sampah pak, pelaksanaan yang biasa – biasa saja masih dapat dikatakan lemah dengan penerapan system pengelolaan sampah yang masih lemah" (*Wawancara Tanggal 2 Agustus 2017*)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah satu petugas pengawas dengan inisial A.M mengenai lemahnya penerapan dan pelaksanaan sistem pengelolaan persampahan. sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

"Saya lihat bahwa penerapan system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang masih lemah pak mengapa demikian dengan penerapan yang begini-begini saja tidak ada perubahan membuat pelaksanaan yang kurang juga" (*Wawancara Tanggal 2 Agustus 2017*)

Selanjutnya melihat tanggapan informan yang berasal dari masyarakat dengan inisial M.I didapati hasilnya sebagai berikut:

"Penerapan yang belum maksimal mengakibatkan saya sendiri sebagai warga masyarakat melihat penerapan sistem pengelolaan persampahan ini masih lemah dengan adanya masyarakat yang masih suka buang sampah sembarangan." (*Wawancara Tanggal 2 Agustus 2017*)

Selanjutnya melihat tanggapan informan yang berasal dari masyarakat dengan inisial A.B.R didapati hasilnya sebagai berikut:

"Penerapan sistem pengelolaan sampah yang ada di Kota Tanjungpinang ini masih lemah dengan fenomena yang terjadi di Kota Tanjungpinang masih memiliki sampah yang berserak sehingga Kota Tanjungpinang masih memilki sampah yang berserakan" (*Wawancara Tanggal 2 Agustus 2017*)

Disamping itu dilakukan wawancara dengan *key informan* (Kabid. Perkim dan Kebersihan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Petamanan Kota Tanjungpinang) Bpk. WB dan didapati hasilnya sebagai berikut:

"Penerapan system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini masih belum maksimal masih banyak memiliki kekurangan yang dialami pemerintah pada saat ini dengan adanya system yang sekarang ini diterapkan menimbulkan pelaksanaan yang masih kurang baik juga" (*Wawancara Tanggal 2 Agustus 2017*)

6. **Ketepatan,** lebih merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi

dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ketepatan dalam teori dunn merupakan Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai, untuk mengetahui indikator ketepatan peneliti harus mengetahui dua hal yaitu keberhasilan dan kegunaan. Keberhasilan ini akan melihat Berhasilnya Penerapan Sistem Pengelolaan Persampahan, sedangkan kegunaan dalam hal ini yang akan dilihat Berhasilnya Penerapan Sistem Pengelolaan Persampahan

a. Keberhasilan, dalam hal ini akan membahas mengenai berhasilnya penerapan sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang.

   Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh salah satu Kasi kebersihan Kota dengan inisial OP mengenai berhasilnya penerapan sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang. sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

   > "Berhasilnya penerapan system pengelolaan persampahan bergantung kepada penerapan nya terlebih dahulu, melihat penerapan yang masih kurang maksimal dan tidak bisa memanfaatkan sampah maka system pengelolaan persampahan ini belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya" (*Wawancara Tanggal 3 Agustus 2017*)

   Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah satu pengawas kebersihan dengan inisial AG berkenaan dengan

berhasilnya penerapan sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang, maka diperoleh hasilnya sebagai berikut:

> "Penerapan system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini masih saja belum bisa dikatakan maksimal dengan itu penerapan yang kurang maksimal juga belum bisa system ini dapat berhasil sepenuhnya" (*Wawancara Tanggal 3 Agustus 2017*)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh salah satu petugas sapu dengan inisial SD mengenai berhasilnya penerapan sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang. sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

> "Menurut saya pak, berhasilnya system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini tergantung pemerintah itu sendiri bagaimana penerapan system yang diterapkan pemerintah itu sendiri, jika system yang sekarang ini hanya bersih-bersih seperti yang saya lakukan sekarang bisa dibilang belum berhasil sepenuhnya" (*Wawancara Tanggal 3 Agustus 2017*)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh petugas kebersihan dengan inisial MR berkenaan dengan berhasilnya penerapan sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang, maka diperoleh hasilnya sebagai berikut:

> "Saya kurang mengerti system yang bagaimana yang bisa dibilang berhasil dan system pengelolaan persampahan yang bagaimana di terapkan di Kota Tanjungpinang dari sepanjang yang saya kerjakan hanya sebagai petugas kebersihan sebenarnya itu bukan merupakan system pengelolaan persampahan yang maksimal, dengan demikian bisa belum dikatakan berhasil". (*Wawancara Tanggal 3 Agustus 2017*)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah satu petugas pengawas dengan inisial A.M mengenai berhasilnya

penerapan sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang. sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

> "Menurut saya pak, masih belum berhasil lah pak system pengelolaan persampahan ini meskipun yang kurang tau juga system yang bagaimana yang diterapkan dalam pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang bagaimana saya bilang yang dikerjakan hanya bersih-bersih aja pak tetapi tidak ada hal selain itu yang dilakukan pemerintah ini, dengan demikian hal itu bisa dikatakan belum berhasil". (*Wawancara Tanggal 3 Agustus 2017*)

Selanjutnya melihat tanggapan informan yang berasal dari masyarakat dengan inisial M.I didapati hasilnya sebagai berikut:

> "Sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang masih belum berhasil dikarenakan penerapan sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang yang masih lemah dengan demikian sistem pengelolaan persampahan belum berhasil dengan apa yang dicita-citakan. (*Wawancara Tanggal 3 Agustus 2017*)

Selanjutnya melihat tanggapan informan yang berasal dari masyarakat dengan inisial A.B.R didapati hasilnya sebagai berikut:

> "Penerapan sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang mengakibatkan pelaksanaan suatu sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang yang belum berhasil dimata saya selaku masyarakat, jika ingin berhasil sistem pengelolaan persampahan maka perbaiki penerapan sistem pengelolaan persampahan dengan demikian maka akan berhasil sistem pengelolaan persampahan" (*Wawancara Tanggal 3 Agustus 2017*)

Disamping itu dilakukan wawancara dengan *key informan* (Kabid. Perkim dan Kebersihan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Petamanan Kota Tanjungpinang) Bpk. WB dan didapati hasilnya sebagai berikut:

> "Penerapan Sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini memang masih belum memenuhi kriteria berhasil dikarena masih kekurangan dalam mengelola persampahan

di Kota Tanjungpinang ini terbatasnya pengetahuan yang ada serta fasilitas-fasilitas-fasilitas yang masih kurang" (*Wawancara Tanggal 3 Agustus 2017*)

b. Kegunaan, berbicara kegunaan kali ini akan menilai ketersediaan sistem pengelolaan persampahan yang baik sesuai kebijakan.

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh salah satu Kasi kebersihan Kota dengan inisial OP mengenai ketersediaan sistem pengelolaan persampahan yang baik sesuai kebijakan. sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

"Kegunaan dalam kali ini merupakan ketersediaan system pengelolaan persampahan yang baik dan sesuai dengan kebijakan, dalam hali ini dinas terkait melaksanakan pengelolaan persampahan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan adanya aturan yang dijadikan pedoman namun kebijakan yang ada belum juga menyediakan system pengelolaan yang baik". (*Wawancara Tanggal 3 Agustus 2017*)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah satu pengawas kebersihan dengan inisial AG mengenai ketersediaan sistem pengelolaan persampahan yang baik sesuai kebijakan. sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

"System pengelolaan persampahan ini belum mampu menyediakan dengan baik system pengelolaan persampahan yang baik, dikarenakan kebijakan yang telah ditetapkan membuat suatu batasan hanya sampai dimana kewenangan kita dalam bekerja" (*Wawancara Tanggal 3 Agustus 2017*)

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh salah satu petugas sapu dengan inisial SD mengenai ketersediaan sistem pengelolaan persampahan yang baik sesuai kebijakan. sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

> "Dilihat dari kegiatan sehari-harinya pak kelihatan bahwa memang di Kota Tanjungpinang ini belum menyediakan system pengelolaan persampahan yang baik, namun demikian dinas terkait hanya berpedoman pada yang sebelumnya tidak membuat inovasi baru agar dapat menyediakan system pengelolaan persampahan yang baik dalam hal ini kami selaku petugas kebersihan hanya menjalan kan perintah yang sesuai kebijakan aja pak". (*Wawancara Tanggal 3 Agustus 2017*)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah satu petugas pengawas dengan inisial A.M mengenai ketersediaan sistem pengelolaan persampahan yang baik sesuai kebijakan. sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

> "Menurut saya pak di Kota Tanjungpinang ini tidak tersedia system pengelolaan persampahan yang baik dan masing-masing bekerja berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, system pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang ini hanya menyediakan system pengelolaan persampahan yang biasa-biasa saja kumpul angkut buang". (*Wawancara Tanggal 3 Agustus 2017*)

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada salah satu petugas pengawas dengan inisial NR mengenai ketersediaan sistem pengelolaan persampahan yang baik sesuai kebijakan. sehingga didapati hasilnya sebagai berikut :

> "Sistem pengelolaan persampahan ini hanya menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan meskipun itu masih belum memadai, tetapi tidak mampu untuk melaksanakan pengelolaan persampahan itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa system pengelolaan persamapahan di Kota Tanjungpinang ini belum menyediakan system yang baik" (*Wawancara Tanggal 3 Agustus 2017*)

Selanjutnya melihat tanggapan informan yang berasal dari masyarakat dengan inisial A.B.R didapati hasilnya sebagai berikut:

> "Penerapan yang baik sesuai dengan kebijakan tentang sistem yang pengelolaan persampahan ini belum maksimal dimana

kebijakan pengelolaan persampahan ini saya lihat hanya sebatas jalan yang diangkut tidak sampai kerumah"(*Wawancara Tanggal 3 Agustus 2017*)

Selanjutnya melihat tanggapan informan yang berasal dari masyarakat dengan inisial M.I didapati hasilnya sebagai berikut:

"Sistem pengelolaan persampahan yang tersedia belum memadai saat ini masih ada tong sampah yang tidak bisa dipakai lagi tetapi masih digunakan dengan fasilitas yang tersedia masih kurang mngakibatkan masyarakat ingin membuang sampah disembarang tempat". (*Wawancara Tanggal 3 Agustus 2017*)

Disamping itu dilakukan wawancara dengan *key informan* (Kabid. Perkim dan Kebersihan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Petamanan Kota Tanjungpinang) Bpk. WB dan didapati hasilnya sebagai berikut:

"Sistem pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang ini hanya sebatas biasa-biasa saja orang buang kita angkut, sarana penunjang masih juga belum terpenuhi untuk mengatasi hal ini agar dapat menyediakan system pengelolaan persampahan yang baik, namun tetap tidak lari dari sebuah kebijakan yang telah ditetapkan". (*Wawancara Tanggal 3 Agustus 2017*)

C. Pembahasan

1. **Efektivitas,** Suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah, biasanya dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Seringkali tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut tidak sesuai yang diharapkan karena faktor lain yang tidak terduga seperti perubahan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut. Salah satu kriteria dasar dalam menilai suatu program atau kebijakan adalah dengan efektivitas.

a. **Tercapainya Tujuan,** Sistem pengelolaan persampahan harus dilaksanakan guna menciptakan pengelolaan persampahan yang terealisasi dengan baik dimana dapat dilakukan analisis serta pembahasan mengenai tercapainya tujuan dengan adanya kriteria system pengelolaan persampahan yang terealisasi dengan baik didapati hasilnya sebagian besar Informan menyatakan bahwa system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini sudah cukup baik dengan adanya memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah ada untuk melakukan pengelolaan persampahan sehingga pada akhirnya sampah yang telah terangkut tidak hanya menjadi tumpukan sampah tetapi diolah menjadi sesuatu keperluan yang dapat digunakan. Meskipun hasil pengelolaan persampahan belum tersebut belum bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kota Tanjungpinang. Dengan Demikian Bahwa sistem pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang masih belum baik dikarenakan system pengelolaan persampahan yang digunakan masih memakai paradigma lama pengumpulan, pengangkutan, pembuangan sehingga sampah yang dibuang ke TPA hanya bisa menjadi bahan kompos tidak bisa digunakan seperti negara – negara yang sudah maju bahkan di negara maju sampah yang ada bisa dijadikan bahan atau barang yang berguna sehingga sampah yang ada tidak kelihatan lagi dan dijadikan hal yang bermanfaat untuk masyarakat di negara atau wilayah tersebut. Dengan demikian dari keseluruhan hasil wawancara dan analisis dengan mengevaluasi system pengelolaan persampahan di

Kota Tanjungpinang sudah hampir efektif dalam indikator efektifitas namun masih ada kendala sehingga system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang baik dari segi teknologi, sarana dan prasarana. Dengan adanya hambatan maupun kendala tersebut system pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang masih belum bisa mengikuti apa yang sudah diterapkan di kota – kota lain maupun negara lain yang sudah menggunakan sestem pengelolaan persampahan dengan memanfaatkan sampah menjadi hal yang berguna seperti dijadikan sumber energy dan hal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

b. **Kejelasan Sasaran** berbicara mengenai system pengelolaan persampahan dalam hal ini yang mana terdapat kesesuaian antara system pengelolaan dengan hasil yang ingin dicapai. Didapati mengenai kesesuaian antara system pengelolaan dengan hasil yang ingin dicapai. didapati hasilnya sebagian besar Informan menyatakan bahwa dengan adanya system pengelolaan ini menciptakan hasil yang dinginkan tidak lain dan tidak bukan menciptakan lingkungan yang bersih. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan lingkungan yang bersih Pemerintah harus menyiapkan system pengelolaan persampahan yang baik agar dapat menciptakan lingkungan yang bersih juga. Dengan demikian Sistem pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang ini masih memiliki kekurangan dalam kesesuaian dengan hasil yang ingin dicapai, pandangan masyarakat dengan adanya system pengelolaan persampahan ini

masyarakat yakin akan terhadap kinerja pemerintah dengan menerapkan system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang, namun sebaliknya pemerintah masih menganggap system pengelolaan persampahan ini masih belum mencapai kriteria yang diinginkan dan ingin meniru system pengelolaan persampahan yang sudah maju dan berhasil menerapkan system pengelolaan sampah yang baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang masih memiliki kekurangan dari wilayah lain yang sudah dapat dikatakan berhasil menerapkan system pengelolaan persampahan yang sebaik-baiknya.

2. **Efisiensi** merupakan kriteria dalam menentukan seberapa besar input yang digunakan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Efisiensi artinya melaksanakan dan menghasilkan segala sesuatu dengan tepat, serta efisien juga merupakan perbandingan antara sumber – sumber yang digunakan dengan output yang dihasilkan. Selanjutnya Dunn mengemukakan indikator evaluasi adalah efisiensi merupakan Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan itu dunn menggunakan indikator untuk mengukur efisiensi yaitu Waktu Pelaksanaan dengan mengetahui Pengelolaan Persampahan oleh DPRKPKP Lebih Susuai dan Tepat, dengan diketahuinya nantinya pengelolaan persampahan yang lebih sesuai dan tepat seperti apa dan hasil tersebut lah kita mengetahui bahwa system pengelolaan persampahan itu efisien atau tidak. Selanjutnya selain efisiensi Dunn juga mengemukaan bahwa indikator untuk mengukur evaluasi adalah Kecukupan yang mana

kecukupan merupakan Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah, dengan ingin diketahuinya pencapaian hasil yang diinginkan dunn mengemukakan bahwa harus mengetahui kepuasan terhadap hasil dimana yang akan di teliti oleh peneliti adalah Sistem Pengelolaan Persampahan Yang Dapat terlaksana sesuai sasaran, dengan hal ini akan terjawab nantinya bagaimana kecukupan yang dimaksudkan dunn tersebut.

a. **Waktu Pelaksanaan,** merupakan sesuatu tolak ukur dalam mengevaluasi dalam sistem pengelolaan Persampahan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang lebih sesuai dan tepat. system pengelolaan persampahan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang lebih sesuai dan tepat. didapati hasilnya bahwa waktu pelaksanaan system pengelolaan persampahan ini telah sesuai dengan jumlah volume sampah yang terkumpul meskipun masih ada tersisa sedikit sampah yang masih tersisa. Waktu pelaksanaan system pengelolaan persampahan ini memang harus direncanakan sebaik mungkin agar menciptakan pelaksanaan yang baik pula. Dengan kondisi yang terjadi pada saat ini waktu pelaksanaan yang terjadi di system pengelolaah persampahan ini sudah cukup baik guna untuk mengharapkan yang lebih baik namun baik hanya di waktu pelaksanaan tetapi masih ada kurang dari segi lainnya. Sehingga

system pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang ini masih belum dikatakan maksimal.

3. **Kecukupan,** yakni system pengelolaan persampahan dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan *(adequacy)* berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternative yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

   a. **Kepuasan terhadap Hasil,** merupakan indikator yang akan dievaluasi dengan memperhatikan sistem pengelolaan persampahan yang dapat terlaksana dengan baik. Sehingga dapat dianalisa Informan mengenai sistem pengelolaan persampahan yang dapat terlaksana dengan baik hampir para informan mengatakan bahwa system pengelolaan persampahan ini masih kurang dari wilayah maupun Negara tetangga yang sudah dikatakan bagus system pengelolaan persampahannya dengan jawaban informan yang salah satunya merupakan petugas kebersihan sehingga mereka memandang sampah yang mereka bersihkan tidak dapat dimanfaatkan kembali dan pada akhirnya menjadi timbunan di TPA. system pengelolaan persampahan kurang maksimal selain budaya masyarakat yang masih ingin membuang sampah sembarangan serta kurangnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang akan mengolah sampah itu

sendiri agar dapat dirasakan masyarakat nantinya. Sistem pengelolaan persampahan yang ada ini masih belum maksimal sehingga masyarakat nya juga belum puas dengan adanya petugas kebersihan yang selama ini bekerja dan bahkan masih memiliki sampah di lingkungan yang belum terangkat. Sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini masih belum mampu menerapkan dengan menggunakan sistem *waste to energy* atau *zero waste* dalam pengelolaan yang mana Pemerintah masih megalami kesulitan dalam hal pengelolaan system pengelolaan persampahan. Hal ini yang menyebabkan bahwa sampah yang sudah ada menjadi timbunan yang bahkan menjulang tinggi diakibatkan banyaknya sampah yang dihasilkan dari masyarakat. Dengan demikan sumber daya manusia serta fasilitas yang belum memadai yang ada di Kota Tanjungpinang inilah yang dihadapi sehingga Pemerintah Kota Tanjungpinang masih belum dapat menggunakan sistem *waste to energy* atau *zero waste.*

4. **Pemerataan,** dalam system pengelolaan sampah dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan. Kriteria kesamaan *(equity)* erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok – kelompok yang berbeda dalam masyarakat, berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan dengan tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat yang merata. Pemerataan yang dikemukakan oleh dunn

merupakan Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda untuk mengetahui pemerataan diperlukan indikator untuk mengetahui pemerataan yang di laksanakan dalam system pengelolaan persampahan dimana indikator tersebut adalah Tidak Mementingkan Kelompok Tertentu. Dengan demikian tidak mementingkan kelompok tertentu kita harus mengetahui bagaimana Sistem Pengelolaan Persampahan yang dapat dijalankan secara menyeluruh. Pada akhir nya nanti peneliti akan mengetahui pemerataan dalam konsep teori dunn tersebut.

a. **Tidak Mementingkan Kelompok Tertentu,** dalam hal ini untuk mengetahui apakah sistem pengelolaan persampahan yang dapat dijalankan secara menyeluruh. Sehingga sistem pengelolaan persampahan yang dapat dijalankan secara menyeluruh didapati hasilnya bahwa system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini masih belum menyeluruh dan masih ada wilayah yang tidak terlayani pengelolaan persampahan sehingga banyak juga persampahan yang tidak terlayani. system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini memang tidak menyeluruh dikarenakan Dinas terkait yang mengelola pengelolaan persampahan ini hanya bekerja berdasarkan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi sesuai aturan yang ada maka dari itu system pengelolaan persampahan ini masih belum menyeluruh. Bahwa system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang belum bisa dijalankan secara menyeluruh dikarena kan terbatasnya tugas pokok

dan fungsi yang telah ditetapkan dengan adanya sebuah peraturan sehingga sistem pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang belum dijalankan secara menyeluruh di Lokasi Kota Tanjungpinang ini karena itu system pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang masih belum maksimal.

5. **Responsivitas,** Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan. Responsivitas dalam indikator evaluasi menurut dunn merupakan Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Untuk mengetahui responsivitas yang dimaksud dunn ini perlunya Keikutsertaan dan partisipasi dimana peneliti ingin meneliti Lemahnya penerapan dan pelaksanaan sistem pengelolaan persampahan.

   a. **Keikutsertaan dan Partisipasi,** maksud dari ini inguin mengetahui bagaimana lemahnya penerapan dan pelaksanaan sistem pengelolaan persampahan. lemahnya penerapan dan pelaksanaan sistem pengelolaan persampahan bahwa penerapan system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini masih lemah dengan penerapan yang biasa – biasa saja akan menimbulkan

pelaksanaan yang lemah juga masih terdapat sampah yang terbuang percuma dengan adanya system pengelolaan persampahan yang ada pada saat ini. Dapat dikatakan bahwa penerapan system pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang masih belum bisa menerapkan sistem pengelolaan sampah yang baik seperti yang diterapkan di Pemerintah wilayah lain. Penerapan system pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang ini masih lemah dikarenakan masih banyak kendala dalam pengelolaan persampahan, dengan adanya penerapan yang masih kurang ini mengakibatkan pelaksanaan yang masih kurang juga, masyarakat masih membuang sampah sembarangan, masyarakat merasa sampah yang dibuang tidak menghasilkan apa-apa. Jika penerapan system pengelolaan persampahan yang baik maka pelaksanaan yang baik juga.

6. **Ketepatan,** lebih merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ketepatan dalam teori dunn merupakan Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai, untuk mengetahui indikator ketepatan peneliti harus mengetahui dua hal yaitu keberhasilan dan kegunaan. Keberhasilan ini akan melihat

Berhasilnya Penerapan Sistem Pengelolaan Persampahan, sedangkan kegunaan dalam hal ini yang akan dilihat Berhasilnya Penerapan Sistem Pengelolaan Persampahan.

a. **Keberhasilan,** dalam hal ini akan membahas mengenai berhasilnya penerapan sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang. berhasilnya penerapan sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang didapati hasilnya bahwa penerapan system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini belum berhasil menerapkan system pengelolaan sampah yang cukup baik seperti wilayah lain yang sudah berhasil menerapkan system pengelolaan persampahan yang baik. Dengan demikian dapat dikatakan penerapan system pengelolaan persampahan yang maksimal di wilayah lain belum bisa di terapkan di Kota Tanjungpinang. penerapan system pengelolaan persampahan yang maksimal di wilayah lain di Kota Tanjungpinang ini belum berhasil diterapkan di Kota Tanjungpinang ini dengan pemahaman yang kurang serta budaya masyarakat yang belum berubah serta fasilitas-fasiltas lain yang masih kurang. Bahwa penerapan yang ada di Kota Tanjungpinang yang ada selama ini masih menggunakan paradigma lama yakni pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, dengan adanya sistem paradigma lama yang masih diterapkan ini membuat penerapan system pengelolaan yang ada di Kota Tanjungpinang ini belum maksimal dan makin banyak menimbulkan jumlah timbunan sampah.

b. **Kegunaan,** berbicara kegunaan kali ini akan menilai ketersediaan sistem pengelolaan persampahan yang baik sesuai kebijakan. system pengelolaan persampahan yang ada ini memang belum bisa menyediakan system yang baik, hampir sebagian sampah yang dibuah hanya menjadi tumpukan dan belum bisa melakukan pengolahan sampah itu sendiri. Berbicara menyediakan memang pemerintah menyediakan sarana dan prasarana tetapi itu hanya sebagai penunjang bukan menyediakan system yang baik. pemerintah mengalami kesulitan untuk menyediakan system pengelolaan persampahan yang baik dengan adanya sesuatu yang terbatas maka dari itu pemerintah hanya menyediakan system pengelolaan persampahan yang belum maksimal agar dapat berjalan nya suatu kebijakan maka dari itu harus disediakan system pengelolaan persampahan. Pemerintah ketika ingin menetapkan kebijakan harus melihat kondisi bisa dijalankan atau tidak jika kebijakan yang telah ditetapkan nantinya, dalam hal ini pemerintah menyediakan system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang hal ini merupakan pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan tentang system pengelolaan persampahan yang ada. Pemerintah belum mampu menetapkan kebijakan yang menjadikan nantinya system pengelolaan persampahan yang baik mengapa demikian pemerintah sudah melihat kondisi yang ada di Kota Tanjungpinang ini dengan adanya hambatan dan gejala masalah maka pemerintah Kota Tanjungpinang belum mampu menyediakan system pengelolaan persampahan yang baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi serta mengetahui seberapa jauh sistem pengelolaan persampahan yang telah diterapkan di Kota Tanjungpinang pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kriteria dari evaluasi ada beberapa indikator sebagai berikut :
   a. Efektivitas, Ekeftifitas dalam hal ini dilihat dari bahwa tercapainya tujuan dari sistem pengelolaan persampahan ini masih belum maksimal dengan yang diharapkan Pemerintah dengan terbatasnya kondisi keuangan serta sarana dan prasarana pendukung, sedangkan kejelasan sasaran masih belum maksimal dengan adanya keterbatasan konsep kebijakan sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang sehingga hasil yang diharapkan masih belum maksimal.
   b. Efisiensi, dalam hal ini dilihat dari waktu pelaksanaan selama system pengelolaan persampahan dapat dikatakan bahwa system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini sudah di jadwal sedemikan rupa agar dapat sesuai dan tepat agar pengelolaan persampahan dapat berjalan.

c. Kecukupan, kepuasan terhadap hasil ini merupakan salah satu indikator dari kecukupan. Maka dari itu akan dapat dilihat bahwa hasil yang diharapkan terkait dengan pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang ini masih belum maksimal dengan adanya hal demikian pemerintah serta masyarakat masih belum puas dengan adanya system pengelolaan persampahan yang ada.

d. Pemerataan, dapat disimpulkan bahwa salah satu indikator dari pemerataan yaitu tidak mementingkan kelompok tertentu maka didapati hasilnya bahwa system pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini berjalan secara menyeluruh di TPS-TPS yang ada.

e. Responsivitas, keikutsertaan dan partisipasi yang akan dilihat guna menunjang kriteria responsivitas, dengan demikian bahwa penerapan system pengelolaan persampahan serta pelaksanaan pengelolaan persampahan yang masih kurang maksimal dengan adanya kondisi serta hambatan yang membuat penerapan serta pelaksanaan system pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang kurang maksimal.

f. Ketepatan, salah satu dimensi ketepatan merupakan keberhasilan dapat dikatakan penerapan system pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang ini masih belum bisa dikatakan berhasil dengan adanya masih tersisa. Selanjutnya kegunaan dapat dikatakan bahwa dengan adanya system pengelolaan persampahan yang biasa-biasa saja dengan kemungkinan besar system pengelolaan persampahan tidak mampu

menyediakan system pengelolaan persampahan yang cukup baik dari wilayah-wilayah lainnya.

2. Sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini belum mampu mengalami masalah persampahan dengan kerbatasan sarana dan prasarana baik itu dari Sumber daya Manusianya bahkan alat operasionalnya, dengan berkaca diwilayah yang sudah berhasil mengatasi masalah persampahan, Kota Tanjungpinang dengan kendala yang telah disebut sebelumnya membuat system pengelolaan perasampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini masih belum mampu meniru dari wilayah yang mampu mengatasi permasalahan persampahan yang sudah bagus serta masih kurang inovasi serta kebijakan yang terpaku pada satu arah mengakibatkan Kota Tanjungpinang sulit meniru serta mengatasi permasalahan persampahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut saran-saran yang diharapkan dan semoga dapat berguna yang meliputi :

1. Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu memperhatikan keadaan sarana dan prasarana guna meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan serta menyediakan konsep-konsep terkait dengan sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu menyediakan sistem pengelolaan persampahan yang akan berdampak terhadap masyarakat agar masyarakat dapat merasakan hasil sampah dari yang mereka buang.

3. Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu terus melakukan penanaman nilai - nilai serta menciptakan kebijakan – kebijakan dalam sistem pengelolaan persampahan yang nantinya diharapkan dapat mengatasi masalah persampahan di Kota Tanjungpinang dengan maksimal.
4. Perlunya inovasi dalam sistem pengelolaan persampahan oleh pemerintah sebagai *stakeholder* guna menciptakan Kota Tanjungpinang yang bersih baik inovasi dalam system, teknologi serta manajemen.
5. Pemerintah dapat melihat mencontoh bahkan memodifikasi sistem pengelolaan persampahan negara – negara maupun daerah – daerah yang telah berhasil mengatasi permasalahan sampahnya yang salah satu caranya adalah melalui *benchmarking*.
6. Pemerintah Kota Tanjungpinang harus merancang sistem pengelolaan persampahan yang semaksimal mungkin serta menetapkan kebijakan yang sesuai dengan keadaan wilayah serta kondisi sampah yang berjalan pada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arikunto S, 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed Revisi VI, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.

Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Arikunto, S dan Cepi A.J, Safrudin. (2009) "Evaluasi Program Pendidikan". Jakarta : Bumi Aksara.

Azwar, A, 1990, Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan, Jakarta, Yayasan Mutiara.

Bungin, B. 2001. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya : Universitas Airlangga.

Camp, R.C. Benchmarking:The Search For Industri Best Practices That Lead to Superior Performance. Milwaukee, Wisconsin: ASQ Quality Press, 1989

Chandra, B. 2006. Pengantar Kesehatan Lingkungan. EGC. Jakarta

Elnathan, S, Thomas, W. Lin, S. M.Y (1996), "Benchmarking and Management Accounting: A Framework for Research", Journal of Management Accounting Research, Vol 8, New York

Horngren, D.F (2003). Akuntansi Biaya: Akuntansi Manajerial. Jilid 2. Edisi Kesebelas. (Diterjemahkan Oleh: Desy Adhariani). Indeks, Jakarta.

Pasolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: Alfabeta.

Syafie, I.K, dkk. (1999). *Ilmu Administrasi Publik.* Jakarta: Reneka Cipta.

Walpole R.E., Dan Myres R.H., Ilmu Peluang Dan Statistik Untuk Insinyur Dan Ilmuwan , Edisi Ke 4, Penerbit ITB, Bandung, 1995.

Wibowo, A dan Darwin T.D. 2006, Jakarta, Penanganan Sampah Perkotaan Terpadu,

JURNAL DAN TESIS

Dahlan, T 2005. Peningkatan Petugas Sampah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Tanjungpinang. Tesis. Semarang : Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota.

Fajriyah N.T 2014. Evaluasi Pengolahan Administrasi Desa Secara Elektronik (Pade) Melalui "Hot-Fit Model" Di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Hilmawan, I. 2012. Penerapan Konsep Benchmarking Dalam Rangka Penyusunan Strategi Baru Perusahaan (Study Kasus Pada PT. Kymco Lippo Motor Indonesia). Jurnal Ilmiah Niagara Vol. 4 No. 3, September 2012.

Ismeidi 2013. Evaluasi Sistem Pembuangan Akhir Sampah di TPA Ngadiro Kota Wonogiri. Jurnal. Surabaya Program Studi Bidang Keahlian Teknik Prasarana Lingkungan Permukiman

Rahardyan B. dan Widagdo A.S. 2005. Peningkatan Pengelolaan Persampahan Perkotaan Melalui Pengembangan Daur Ulang. Materi Lokakarya 2 Pengelolaan Persampaham di Propinsi DKI Jakarta. Jakarta.

Syafrudin dan Priyambada I.B. 2001. Pengelolaan Limbah Padat. Semarang: Fakultas Teknik UNDIP.

Tato, S 2015. "Evaluasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Gowa Studi Kasus Kecamatan Somba Opu" Jurnal. Makasar: Jurusab Teknik PWK.

Yones, I 2007. Kajian Pengelolaan Sampah Di Kota Ranai Ibu Kota Kabupaten Natuna. Tesis. Semarang: Program Magister Lingkungan Propinsi Kepulauan Riau

Yulia R.S. 2011. Evaluasi Metode Pengelolaan Sampah Untuk Umur Layan Di Tpa Putri Cempo. Jurnal Volume 12 No.2 September 2011 Surakarta Program Studi Teknik Sipil.

Undang – Undang

Peraturan Daerah Nomor: 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan

Keputusan Walikota nomor : 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang.

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 58 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No.11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang

SURAT PERMOHONAN IZIN WAWANCARA

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	**: Asrian Aderi S.IP**
NIM	**: 500627965**
Program Studi	**:Magister Administrasi Publik**
Jenjang Pendidikan	**:(S-2)**

Pedoman wawancara ini ditujukan Kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, Sekretaris, Pejabat serta staf pelaksana yang bersangkutan mengenai **Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan di Kota Tanjungpinang**. Berkenaan dengan hal yang dimaksud mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penjelasan yang lengkap dan terbuka. Maka dari itu dalam hal wawancara dan sekaligus penelitian yang dilakukan ini yang artinya semua jawaban yang diberikan oleh informan adalah benar dan jawaban yang diminta adalah sesuai dengan kondisi yang dirasakan bapak/ibu/sdr/i bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian saja. Atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Tanjungpinang, Juli 2017

ASRIAN ADERI S.IP

PEDOMAN WAWANCARA

EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA TANJUNGPINANG

A. Identitas Peneliti :

Nama : Asrian Aderi S.IP

NIM : 500627965

Program Studi : **Magister Administrasi Publik**

B. Responden :

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Pendidikan :

C. Daftar Pertanyaan

1. Efektivitas

a. Tercapainya Tujuan

- Apakah Sistem Pengelolaan Persampahan yang terealisasi dengan baik ?

.....

.....

.....

b. Kejelasan Sasaran

- Bagaimana kesesuaian antara konsep kebijakan dan hasil ?

.....

.....

.....

2. Efisiensi

a. Waktu Pelaksanaan

- Apakah pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh DPRKPKP lebih sesuai dan tepat ?

.....

.....

.....

3. Kecukupan

a. Kepuasan Terhadap Hasil

- Apakah sistem pengelolaan persampahan dapat terlaksana sesuai sasaran ?

.....

.....

.....

4. Pemerataan

a. Tidak Mementingkan Kelompok Tertentu

- Apakah sistem pengelolaan persampahan dapat dijalankan secara menyeluruh ?

.....

.....

.....

5. Responsivitas

a. Keikutsertaan dan Partisipasi

- Mengapa lemahnya penerapan dan pelaksanaan sistem pengelolaan persampahan ?

.....

.....

.....

6. Ketepatan

a. Keberhasilan

- Apakah berhasil penerapan sistem pengelolaan persampahan yang baik sesuai kebijakan ?

.....

.....

.....

b. Kegunaan

- Bagaimana ketersediaan sistem pengelolaan persampahan yang baik sesuai kebijakan ?

.....

.....

.....

Tabel Conclusing Drawing/Verification

Judul TAPM : Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan Di Kota Tanjungpinang

TEORI	ORIENTASI (OBSERVASI LAPANGAN)	WAWANCARA INFORMAN	INTERPRETASI DATA
William N. Dunn, 2003: 158 1. Kriteria yang pertama adalah Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuannya dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya. Kriteria ini memiliki 2 (dua) indikator, yaitu Tercapainya Tujuan dan Kejelasan Sasaran.		**1. Efektivitas** **Indikator :** a. Tercapainya Tujuan b. Kejelasan Sasaran	- Sistem pengelolaan persampahan yang digunakan masih memakai paradigma lama pengumpulan, pengangkutan, pembuangan
2 Kriteria yang kedua adalah Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Kriteria ini memiliki 1 (Satu) indikator yaitu Waktu Pelaksanaan.		**2. Efisiensi** **Indikator :** a. Waktu Pelaksanaan	- Dengan kondisi yang terjadi pada saat ini waktu pelaksanaan yang terjadi di system pengelolaah persampahan ini sudah cukup baik guna untuk mengharapkan yang lebih baik namun baik hanya di waktu pelaksanaan tetapi masih ada kurang dari segi lainnya. Sehingga system pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang ini masih belum dikatakan maksimal.

	TEORI	ORIENTASI (OBSERVASI LAPANGAN)	WAWANCARA INFORMAN	INTERPRETASI DATA
3	Kriteria yang ketiga adalah Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria ini memiliki 1(Satu) indikator, yaitu Kepuasan Terhadap Hasil.		**3. Kecukupan** **Indikator :** a. Kepuasan Terhadap Hasil	- Sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang ini masih belum mampu menerapkan dengan menggunakan sistem waste to energy atau zero waste dalam pengelolaan
4	Kriteria yang keempat adalah Perataan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang pada akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kriteria ini memiliki 1 (satu) indikator, yaitu Tidak Mementingkan Kelompok tertentu.		**4. Pemerataan** **Indikator** a. Tidak mementingkan kelompok tertentu	- Sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kota Tanjungpinang belum bisa dijalankan secara menyeluruh dikarena kan terbatasnya tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

43254.pdf

TEORI	ORIENTASI (OBSERVASI LAPANGAN)	WAWANCARA INFORMAN	INTERPRETASI DATA
5. Kriteria yang kelima adalah Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan. Responsivitas dikatakan masih gagal jika belum menanggapi kebutuan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Kriteria ini memiliki 1 (satu) indikator, yaitu Keikutsertaan dan Partisipasi.	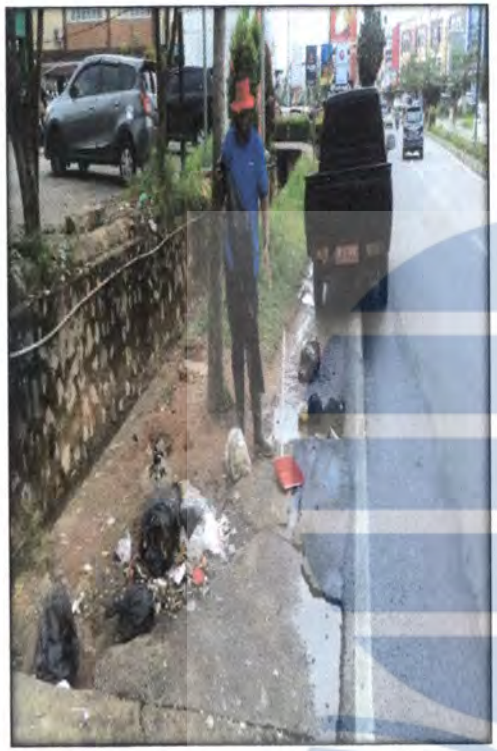	**5. Responsivitas** **Indikator** a. Keikutsertaan dan partisipasi	- Penerapan system pengelolaan persampahan di Kota Tanjungpinang ini masih lemah dikarenakan masih banyak kendala dalam pengelolaan persampahan.

TEORI	ORIENTASI (OBSERVASI LAPANGAN)	WAWANCARA INFORMAN	INTERPRETASI DATA
6. Kriteria yang keenam adalah Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Kriteria ini memiliki 2 (dua) indikator, yaitu Keberhasilan dan Kegunaan.		**6 Ketepatan** **Indikator** a. Keberhasilan	- Bahwa penerapan yang ada di Kota Tanjungpinang yang ada selama ini masih menggunakan paradigma lama yakni pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, dengan adanya sistem paradigma lama yang masih diterapkan ini membuat penerapan system pengelolaan yang ada di Kota Tanjungpinang ini belum maksimal dan makin banyak menimbulkan jumlah timbunan sampah.
		b. Kegunaan	- Pemerintah belum mampu menetapkan kebijakan yang menjadikan nantinya system pengelolaan persampahan yang baik